



RENJA 2026



**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

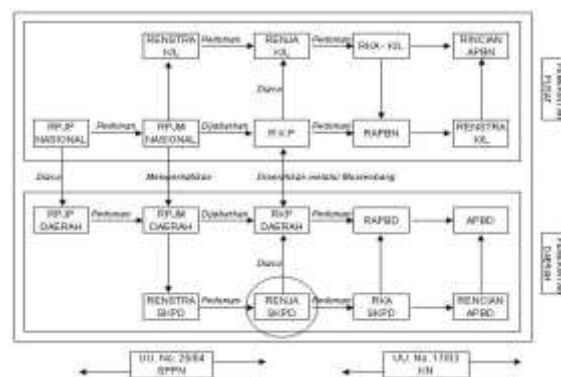
Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Pasuruan dengan tetap mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD/RPD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kejadian pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan merumuskan tema pembangunan daerah tahun 2026 yakni Hilirisasi Industri dan Pengolahan Potensi Unggulan Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. tema tersebut dijabarkan ke dalam 4 prioritas pembangunan daerah diantaranya Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kerja yang berdaya saing, Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku, Pengembangan industry Pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja (PD) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Petunjuk Tehnis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air Di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
44. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
45. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan;
46. Rancangan Renstra 2025-2026 Perangkat Daerah

47. Peraturan Bupati No Tahun 2026 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 adalah langkah atau cara untuk mencapai maksud Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Dokumen Renja 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka akan disampaikan evaluasi tahun 2024.

Evaluasi Renja tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, serta penyusunan strategi yang perlu dilakukan untuk optimalisasi kinerja ditahun selanjutnya.

Hasil evaluasi digunakan untuk penyesuaian atau perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta perencanaan tahun kedepannya.

Evaluasi Renja (anggaran) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disajikan melalui evaluasi pendapatan, evaluasi realisasi belanja serta evaluasi kinerja.

Evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Renja (Pendapatan) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

URAIAN	TARGET	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
PENDAPATAN :				
- Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	1.630.345.000	1.725.893.900	(95.548.900)	105,86
- Retribusi Sewa Tempat Pemakaman / Pembakaran / Pengabuan Mayat	4.530.000	4.530.000	-	100,00
- Retribusi Pemakaian Laboratorium	440.000.000	577.301.806	(137.301.806)	131,20
JUMLAH PAD	2.074.875.000	2.307.725.706	(232.850.706)	111,22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari beberapa OPD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi persampahan tahun 2024 memperoleh

capaian sebesar 105,86%, dari retribusi pemakaman mencapai 100% dan dari retribusi Laboratorium Lingkungan mencapai 131,20%.

Retribusi persampahan melebihi target yang ditetapkan, yaitu ketercapaiannya sebesar 105,86%, untuk meningkatkan capaian tahun depan perlu dilakukan forum konsultasi publik terkait pelayanan persampahan untuk menjaring masalah yang ada dilapangan sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut, dengan harapan adanya optimalisasi terkait hak dan kewajiban pelayanan persampahan termasuk capaian retribusinya.

Retribusi pemakaian laboratorium melebihi target yang ditetapkan, dimana ketercapaiannya sebesar 100%. UPT Laboratorium Lingkungan Kab. Pasuruan hanya melayani uji kualitas air limbah dimana tidak semua parameter uji bisa dilakukan, namun dengan banyaknya jumlah perusahaan atau industri yang merupakan sasaran atau customer target masih dapat tercapai. Melihat potensi industri yang besar dan ekstensifikasi jenis pelayanan yang bisa dilakukan oleh UPT Laboratorium, maka dukungan yang optimal dari Pemda Kab. Pasuruan sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan yang dapat berimbas pada peningkatan PAD dari pelayanan uji air limbah.

Retribusi sewa tempat pemakaman mencapai target yang ditetapkan, yaitu ketercapaiannya sebesar 100%, pemakaman yang dimaksud adalah lokasi pemakaman Cina di Kecamatan Purwosari, tidak mencapai target karena rendahnya penggunaan lahan pemakaman di lokasi tersebut.

Kondisi tahun 2024 mengenai pendapatan berbeda dengan tahun 2023, hal ini berdasarkan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan segala pertimbangan teknis dan social maka retribusi pemakaman sudah dihapus, sehingga pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan hanya menyisakan retribusi persampahan dan pelayanan uji air limbah di UPT Laboratorium.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah instrumen ekonomi yang penting dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu komitmen dan keseriusan untuk perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasinya dalam rangka optimalisasinya, dengan optimalnya PAD maka kemandirian APBD dalam hal pendapatan akan semakin tinggi.

Evaluasi realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diuraikan berdasarkan jenis belanja dan sumber anggaran. Berdasarkan jenis belanja diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Evaluasi Renja (realisasi belanja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
BELANJA :				
Belanja Pegawai	9.166.879.461	8.698.065.595	468.813.866	94,89
Belanja Barang Dan Jasa	20.491.432.713	20.128.809.237	362.623.476	98,23
Belanja Modal	4.595.575.552	4.404.029.200	191.546.352	95,83
JUMLAH BELANJA	34.253.887.726	33.230.904.032	1.022.983.694	97,01

Berdasarkan tabel diatas secara umum menunjukkan bahwa capaian serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup cukup tinggi yaitu berada pada kisaran 97,01%. Berdasarkan rincian jenis belanja secara berurutan dari yang tertinggi capaian serapannya adalah belanja barang dan jasa (98,23%), belanja modal (95,83%) dan yang terakhir belanja pegawai (94,89%).

Belanja barang dan jasa serta belanja modal berisikan jenis belanja yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan pelayanan urusan lingkungan hidup yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Belanja modal serapannya hanya 98,23% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran melalui proses pengadaan barang dan jasa melalui proses tender, pengadaan langsung dan e- catalog. Belanja pegawai memiliki realisasi yang paling rendah, hal ini tidak bisa dikontrol sepenuhnya karena anggaran belanja pegawai sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sedangkan belanjanya diatur oleh Peraturan Pemerintah yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tidak bisa mencapai 98%-99% juga disebabkan karena masih kurang cermatnya perencanaan dan penganggaran, dimana proses perencanaan dan penganggaran pada T-1 belum secara detail disusun, sehingga pada saat tahun berjalan atau tahun 2024, masih membutuhkan waktu untuk pendetailan kelengkapan proses pengadaan seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Aksi untuk pendetailan jadwal dan lain-lainnya. Perencanaan yang kurang detai juga akan berimbas pada proses monitoring dan evaluasi yang kurang optimal.

Realisasi belanja juga disampaikan berdasarkan sumber anggarannya. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan tahun 2024 berasal dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK fisik) dengan rincian seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Evaluasi Renja (anggaran) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
DANA :				
DAU	29.985.905.726	29.134.367.032	851.538.694	97,16
DAK	3.309.320.000	3.309.240.000	80.000	99,99
DBHCHT	958.662.000	787.297.000	171.365.000	82,12
Jumlah Belanja	34.253.887.726	33.230.904.032	1.022.983.694	97,01

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran dengan sumber dana DAK (99,99) lebih tinggi dari realisasi penyerapan anggaran dengan sumber dana DAU (97,16%) disebabkan adanya sisa pada jenis belanja pegawai dan DBHCHT (82,12%).

Kinerja DLH diuraikan melalui tujuan yaitu “Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” dengan indikator Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan dua sasaran yaitu “meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dan “meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Sasaran “Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” memiliki 4 (empat) indikator dan sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah” memiliki 1 (satu) indikator seperti dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Hasil evaluasi Renja (kinerja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dalam renja 2024 mendukung sasaran RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026 melalui 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator tahun 2024 , seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			
	1. Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,11%	0,64%	57,66
	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	100
	2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	52,17%	56,20%	107,72
	3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55%	76,60%	139,27
	4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	46,67%	80,40%	172,27
	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
	1. Nilai SAKIP DLH	85,00 poin	83,20	97,88

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan maupun sasaran capaiannya diatas target yang ditetapkan.

Capaian kinerja target sasaran strategi dari setiap indikator ada 1 tujuan yang tidak mencapai target hanya 57,66% yang dikarenakan salah satu formulasi menurun dari tahun sebelumnya yaitu nilai IKLH. Ada juga 1 sasaran yang tidak mencapai target yaitu Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator nilai SAKIP DLH yang hanya mencapai 97,88%. Sedangkan 4 sasaran lainnya mencapai target bahkan melebihi target yang ditentukan. Dengan demikian maka secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang lingkungan hidup

secara baik dalam rangka tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung tercapainya indikator sasaran diatas, dilakukan melalui pelaksanaan 11 program, 19 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Capaian kinerja tahun 2024 evaluasinya sebagai berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan perangkat daerah	11.301.461.448	10.747.912.769	95,10%	100,00%	100,00%	100,00%
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	71.503.400	70.251.866	98,25%	100,00%	100,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.878.000	21.649.000	98,95%	3	3	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.194.500	11.938.250	97,90%	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6.596.000	6.477.620	98,21%	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4.861.900	4.729.600	97,28%	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1.997.000	1.941.800	97,24%	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.000	7.417.750	97,07%	4	4	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.334.000	16.097.846	98,55%	3	3	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	10.114.927.430	9.622.530.741	95,13%	100,00%	100,00%	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.954.984.462	8.492.370.595	94,83%	80	80	100,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.112.172.668	1.083.341.946	97,41%	13	13	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.612.000	12.008.900	95,22%	7	7	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.158.300	34.809.300	99,01%	18	18	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12.297.000	11.536.270	93,81%	100,00%	100,00%	100,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.297.000	11.536.270	93,81%	2	2	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	15.600.000	14.604.000	93,62%	100,00%	100,00%	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15.600.000	14.604.000	93,62%	16	15	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen administrasi umum	398.051.024	369.725.759	92,88%	100,00%	100,00%	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.000.000	14.973.550	99,82%	10	10	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29.635.000	29.286.000	98,82%	24	24	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31.314.000	31.222.000	99,71%	8	8	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.961.224	10.599.000	96,70%	8	8	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	33.437.000	29.559.000	88,40%	8	8	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.529.800	20.382.700	90,47%	8	8	75,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.174.000	233.703.509	91,59%	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah	82.973.294	76.474.000	92,17%	100,00%	100,00%	100,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	34.070.000	30.125.000	88,42%	16	16	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.164.000	14.600.000	96,28%	1	1	100,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33.739.294	31.749.000	94,10%	7	7	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan dokumen laporan pelayanan publik SKPD	101.600.000	89.327.723	87,92%	100,00%	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96.600.000	84.776.723	87,76%	48	48	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.000.000	4.551.000	91,02%	3	3	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan dokumen laporan pemeliharaan BMD	504.509.300	493.462.410	97,81%	100,00%	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	340.688.400	331.279.410	97,24%	210	210	100,00%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.880.900	7.500.000	95,17%	20	20	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11.300.000	11.000.000	97,35%	70	70	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	126.720.000	125.846.000	99,31%	2	2	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17.920.000	17.837.000	99,54%	5	5	100,00%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	380.319.600	375.417.534	98,71%	44,44%	44,44%	100,00%
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	211.897.600	208.238.091	98,27%	59,32%	59,32%	100,00%
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH kabupaten/Kota	190.278.000	187.511.691	98,55%	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	21.619.600	20.726.400	95,87%	2	2	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase efektifitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	168.422.000	167.179.443	99,26%	20%	20%	100,00%
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang di susun	168.422.000	167.179.443	99,26%	1	1	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	2.671.951.313	2.613.797.730	97,82%	55%	95%	172,58%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
HIDUP	Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis				40	50%	125,00%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	2.370.697.313	2.318.563.805	97,80%	100%	100%	100,00%
	Persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan				40%	20%	50,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.716.327.600	1.715.623.486	99,96%	119	94	78,99%
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	53.445.000	52.985.350	99,14%	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	600.924.713	549.954.969	91,52%	1204	1050	87,21%
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	169.693.000	165.171.797	97,34%	3,00%	3,60%	120,00%
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	164.022.000	159.531.847	97,26%	30	36	120,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5.671.000	5.639.950	99,45%	4	4	100,00%
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	131.561.000	130.062.128	98,86%	23,00%	33,30%	144,78%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	131.561.000	130.062.128	98,86%	12	16	133,33%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	5.634.330.185	5.326.909.772	94,54%	8,8%	8,8%	100,00%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	5.634.330.185	5.326.909.772	94,54%	12,5%	12,5%	100,00%
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang Disusun	114.856.300	112.419.000	97,88%	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.519.473.885	5.214.490.772	94,47%	800	800	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	259.791.333	254.249.324	97,87%	33%	33,33%	101,00%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	126.389.333	124.291.666	98,34%	100,00%	156,67%	156,67%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	88.798.000	86.723.316	97,66%	30	47	156,67%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terintegrasi secara Elektronik							
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	37.591.333	37.568.350	99,94%	30	59	196,67%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	Fasilitas pengumpulan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Pasuruan	133.402.000	129.957.658	97,42%	100,00%	196,67%	196,67%
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.042.000	1.968.000	96,38%	1	2	200,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	131.360.000	127.989.658	97,43%	3	8	266,67%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	244.339.749	226.716.373	92,79%	53,00%	53,00%	100,00%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	244.339.749	226.716.373	92,79%	15,3%	15,3%	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	78.291.799	71.484.559	91,31%	45	44	97,78%
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD dan tenaga pengawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	22.086.500	21.226.900	96,11%	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yg Izin LH, Izin PPLH yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	143.961.450	134.004.914	93,08%	15	19	126,67%
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	36.111.700	28.941.175	80,14%	25	25	100,00%
Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	12.296.500	10.875.450	88,44%	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	12.296.500	10.875.450	88,44%	8	8	100,00%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	23.815.200	18.065.725	75,86%	2	2	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	23.815.200	18.065.725	75,86%	2	2	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	100.000.000	99.147.700	99,15%	5,16%	5,16%	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	100.000.000	99.147.700	99,15%	88	88	100,00%
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	100.000.000	99.147.700	99,15%	4	4	100,00%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	70.000.000	61.676.600	88,11%	2,8%	2,8%	100,00%
Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	70.000.000	61.676.600	88,11%	4,58%	4,58%	100,00%
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70.000.000	61.676.600	88,11%	4	4	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	114.368.100	112.452.450	98,33%	100,00%	100,00%	100,00%
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	114.368.100	112.452.450	98,33%	100,00%	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	82.834.200	81.212.750	98,04%	15	19	126,67%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan /atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	31.533.900	31.239.700	99,07%	15	6	40,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	13.441.214.299	13.383.682.605	99,57%	79,3%	79,3%	100,00%
	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA				32,10%	32,10%	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	13.441.214.299	13.383.682.605	99,57%	22,2%	22,2%	100,00%
	Persentase penanganan sampah				22,8%	22,8%	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	32.940.000	32.771.711	99,49%	2	2	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	jumlah sampah yang terdaur ulang	440.646.479	435.372.110	98,80%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6.702.128.420	6.687.714.644	99,78%	111466	111466	100,00%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	5.534.938.000	5.531.580.950	99,94%	38	38	100,00%
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	258.432.000	256.572.100	99,28%	8591	8591	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	110.000.000	106.854.900	97,14%	33	33	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	39.433.400	38.900.190	98,65%	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	322.696.000	293.916.000	91,08%	8	8	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Pemrosesan Akhir						
	JUMLAH	34.253.887.727	33.230.904.032	97,01%			

Berdasarkan tabel 2.5 tentang realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2024 diatas yaitu untuk tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menjalankan 11 Program, 23 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan.

Program dengan tingkat kinerja realisasi anggaran terbaik yaitu program pengelolaan persampahan yaitu 99,57% Program pengelolaan persampahan adalah salah satu dari program prioritas di DLH, dimana anggarannya dipergunakan untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Pasuruan seperti pengelolaan TPA Wonokerto, pengangkutan residu sampah dari TPS ke TPA, pengadaan sarana prasarana persampahan, gaji tenaga penyapuan dan sopir pengangkutan sampah, sosialisasi pengelolaan sampah dari sumbernya dan banyak hal lain. Anggaran persampahan yang ada sebetulnya belum mencukupi kebutuhan pengelolaan sampah dengan cakupan satu Kabupaten, pengelolaan sampah dibantu dengan CSR perusahaan. Anggaran tidak terserap 100% karena proses efisiensi anggaran pada proses tender, sehingga dapat disimpulkan kinerja penyerapan anggaran sudah optimal.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra s/d tahun berjalan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)		
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Urusan Wajib						
(diisi)	Bidang Lingkungan Hidup						
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	66,67	%	111,11	%	166,66
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,71	%	122,03	%	184,61
2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun			0		0,00
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan			0		0,00
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	3	dokumen	5	dokumen	250,00
2.11.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	1	dokumen	3	dokumen	300,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan	60	%	80	%	143,99
2.11.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2	dokumen	2	dokumen	100,00
2.11.02.2.02.02	Sub kegiatan Pembuatan	Jumlah Dokumen KLHS			1		0,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Persentase meningkatnya	60	%	154,92	%	238,34
		Persentase meningkatnya	50	%	100	%	166,67
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Persentase dokumen uji	57,44	%	157,44	%	157,44
		Persentase sektor dokumen	20	%	40	%	40,00
2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	54	dokumen	148	dokumen	124,37
2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil	1	dokumen	2	dokumen	40,00
2.11.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan	Jumlah Pengambilan			0		0,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	1220	dokumen	2270	dokumen	181,02
2.11.03.2.02	Penanggulangan	Persentase pemberian	2	%	5,6	%	80,00
2.11.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pemberian	Jumlah Laporan Sosialisasi	20	laporan	56	laporan	80,00
2.11.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2	titik	6	titik	150,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	29	%	62,3	%	178,00
2.11.03.2.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil			0		0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi	jumlah kegiatan koordinasi			0		0,00
2.11.03.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil			0		0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi	jumlah kegiatan koordinasi			0		0,00
2.11.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			0		0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi	jumlah kegiatan koordinasi	12	kegiatan	28	kegiatan	175,00
2.11.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			0		0,00
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi	jumlah kegiatan koordinasi			0		0,00
2.11.04	Program Pengelolaan	Persentase peningkatan	9,35	%	18,15	%	183,33
2.11.04.2.01	Pengelolaan	Persentase peningkatan	17,65	%	30,15	%	135,69

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)		
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	dokumen	2	dokumen	200,00
2.11.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			0		0,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			0		0,00
2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan	Luas RTH yang Dikelola	850	ha	1650	ha	183,33
2.11.05	Program Pengendalian	Presentase	67	%	100,3	%	100,30
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara	Persentase pemenuhan	100	%	256,67	%	256,67
2.11.05.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30	dokumen	77	dokumen	256,67
2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15	laporan	74	laporan	246,67
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100	%	296,67	%	296,67
2.11.05.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	3	dokumen	300,00
2.11.05.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2	dokumen	10	dokumen	333,33
2.11.06	Program Pembinaan dan	Persentase menurunnya	47	%	100	%	250,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan	Persentase Pengawasan	15,64	%	30,94	%	176,60
2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			44		97,78
2.11.06.2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			0%		0,00
	Pengembangan Kapasitas	Jumlah PPLHD yang	6	orang	11	orang	183,33
2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan	Jumlah Laporan Dari Usaha			0		0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)		
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	8	badan usaha	27	badan usaha	158,82
2.11.06.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah dokumen hasil			0		0,00
2.11.07	Program Pengakuan	persentase MHA yang	33	%	58	%	138,10
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan	jumlah MHA yg diakui	1	lembaga	2	lembaga	200,00
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	10	dokumen	18	dokumen	150,00
2.11.07.202	Kegiatan Peningkatan	Jumlah MHA yang	3	lembaga	5	lembaga	125,00
2.11.07.202.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3	dokumen	5	dokumen	125,00
2.11.08	Program Peningkatan	Persentase lembaga	7,54	%	12,7	%	127,77
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan	Jumlah lembaga Sekolah,	85	lembaga	173	lembaga	167,96
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan	Jumlah Pendampingan	4	dokumen	8	dokumen	200,00
2.11.09	Program Penghargaan	Persentase	3,17	%	5,97	%	175,59
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4,93	%	9,51	%	180,11
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja	Presentase Meningkatnya	4	entitas	8	entitas	200,00
2.11.10	Program Penanganan	Persentase jumlah	100	%	200	%	200,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan	persentase Jumlah	100	%	200	%	200,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditanganii			0		0,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditanganii	12	pengaduan	31	pengaduan	206,67
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			0		0,00
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	6	perkara	12	perkara	80,00
2.11.11	Program Pengelolaan Sampahan	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	43,7	%	75,8	%	92,44
		Persentase capaian target	78	%	157,3	%	286,52
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	23,4	%	46,2	%	187,80
		Persentase capaian penanganan sampah	30,6	%	52,8	%	96,17
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2	dokumen	4	dokumen	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)		
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			0%		0,00
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah	Jumlah sampah yang	99683	ton	99783	ton	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			0%		0,00
2.11.11.2.01.0018	Penanganan sampah	Jumlah sarana dan	12	unit	50	unit	0,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	127798	ton	239264	ton	0,00
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	8591	ton	17182	ton	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	33	kelompok	66	kelompok	200,00
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	dokumen	2	dokumen	200,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan	Prasarana Penanganan	12	unit	20	unit	111,11
2.11.01	Program Penunjang Urusan	Persentase	100	%	200	%	200,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok	100	%	200	%	200,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	2	dokumen	4	dokumen	133,33
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dokumen	6	dokumen	300,00
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dokumen	4	dokumen	200,00
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah penyusunan	2	dokumen	4	dokumen	200,00
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	4	dokumen	200,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	4	laporan	8	laporan	200,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi	3	laporan	6	laporan	200,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase laporan	100	%	200	%	200,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	73	org/bulan	153	org/bulan	191,25
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	36	dokumen	49	dokumen	136,11
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	6	dokumen	13	dokumen	216,67
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	19	laporan	37	laporan	194,74
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan			0		0,00
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik	Persentase	100	%	200	%	200,00
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik	Jumlah Dokumen	2	dokumen	4	dokumen	66,67
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan			0		0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	%	200	%	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)		
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	orang	22	orang	110,00
2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan	Jumlah Unit Peningkatan			0		0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan	100	%	200	%	200,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	2	paket	12	paket	25,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	3	paket	11	paket	183,33
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan	2	paket	10	paket	125,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	4	paket	12	paket	133,33
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang	12	paket	24	paket	200,00
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket			0		0,00
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	12	laporan	24	laporan	200,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12	laporan	24	laporan	200,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik	Persentase pengadaan BMD	100	%	200	%	200,00
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		0,00
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan			0		0,00
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang			16		160,00
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan			0		0,00
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan	1	unit	8	unit	44,44
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa	Persentase Penyediaan	100	%	200	%	200,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	96	laporan	200,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	4	laporan	80,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase BMD kondisi	100	%	200	%	200,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	6	unit	216	unit	3600,00
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	1	unit	21	unit	175,00
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	8	unit	78	unit	975,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	4	unit	200,00
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	10	unit	500,00

Tabel 2.8.A				
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025				
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00	100,00	Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota sangat dipengaruhi oleh penyediaan anggaran, koordinasi lintas sektor dan kemampuan daerah dalam memastikan pemenuhan data indikator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup harus ditindaklanjuti dengan diseminasi muatan RPPLH dan dorongan kepada seluruh pihak untuk melaksanakannya
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	94,87	100,00	Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral untuk memastikan pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perlu segera dilakukan review dan pembaruan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi pelaksanaan Dokumen RPPLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2049
Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	150,00	100,00	Keberhasilan pelaksanaan Sub kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota sangat dipengaruhi oleh koordinasi pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh di wilayah kabupaten, yang dapat meningkatkan capaian dan pemenuhan data indikator	Diperlukan koordinasi lintas sektoral secara lebih intensif guna memastikan pemenuhan data-data indikator pengendalian pelaksanaan RPPLH
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	33,33	100,00	Keberhasilan pelaksanaan Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota sangat dipengaruhi oleh pemenuhan data indikator dan kompetensi teknis dari anggota tim penyusun	Diperlukan kolaborasi dengan semua pihak dalam melaksanakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	120,00	100,00	Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor dan kemampuan daerah dalam memastikan ketercapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Integrasi KLHS RPJMD dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan wajib dilakukan melalui pelaksanaan verifikasi integrasi oleh Beappeda Provinsi untuk memastikan bahwa muatan KLHS telah menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 - 2029
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	50,00	100,00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0,00	100,00	Pelaksanaan pembekalan tim KLHS tertunda karena diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait sinkronisasi time line dan jenis penyusunan KLHS (provinsi dan kabupaten)	Perlu dilakukan peningkatan kompetensi teknis tim penyusun KLHS, perlu dipertimbangkan penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan Perencanaan Wilayah Kota dan/atau yang menguasai teknis pemetaan (ArcGIS)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	92,31	100,00		
	83,33	100,00		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100,00	100,00		
	80,00	100,00	Anggaran hanya cukup untuk 1 sektor. 20% hanya mencakup 1 sektor IGRK yaitu sektor limbah (sampah & air limbah). Total sektor IGRK ada 5, sehingga setiap sektor memiliki bobot 20%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100,00	100,00	Tidak berhasil karena anggaran hanya cukup untuk pengujian Air Badan air sebanyak 54 titik dan udara ambien 40 titik. Sehingga total 94 titik (dalam hal ini 94 dokumen)	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	80,00	100,00		
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	98,01	100,00	Sumber daya (jumlah analis, sarana dan prasarana) yang kurang mencukupi; Adanya perusahaan yang tutup dan perusahaan mengujikan ke laboratorium lainnya	Menambah jumlah analis, sarana dan prasarana (alat laboratorium dan bahan kimia)
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	85,71	100,00	Banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang muncul dan dapat terselesaikan dengan baik terkait kasusnya	Akan dilakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan sosialisasi agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	85,71	100,00	Banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang muncul dan dapat terselesaikan dengan baik terkait kasusnya	Akan dilakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan sosialisasi agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100,00	100,00	Banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang muncul dan dapat terselesaikan dengan baik terkait kasusnya	Akan dilakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan sosialisasi agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	82,86	100,00	Target kinerja tercapai karena secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	100,00	100,00		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	87,50	100,00	Target kinerja tercapai karena secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang ditetapkan	
Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	100,00	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	100,00	100,00		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	94,44	100,00		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	79,43	100,00		
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,00	100,00	Dokumen KEHATI (Rencana Induk Pengelolaan KEHATI, pengadaan lokasi KEHATI) yang Disusun dan ditetapkan/divalidasi serta dokumen kelengkapan	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	0,00	100,00		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	94,44	100,00	Sesuai Target RTH yang dikelola dalam 1 tahun	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	67,00	100,00		
Penyimpanan Sementara Limbah B3	100,00	100,00		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100,00	100,00	Realisasi Kinerja melebihi target karena Sub Kegiatan ini melingkupi pelayanan publik, maka permohonan fasilitasi izin penyimpanan sementara LB3 yang masuk harus segera ditindaklanjuti	Meningkatkan kinerja pelayanan selaras dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	100,00	100,00	Realisasi Kinerja melebihi target karena Sub Kegiatan ini melingkupi verifikasi lapangan sesuai dengan permohonan fasilitasi izin penyimpanan sementara LB3 yang masuk dan harus segera ditindaklanjuti	Meningkatkan kinerja pelayanan selaras dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100,00	100,00	Realisasi kinerja melebihi target karena kebutuhan koordinasi lebih lanjut terkait fasilitas pengumpulan Limbah B3 yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan	Meningkatkan kinerja pelayanan selaras dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	100,00	100,00	Realisasi kinerja melebihi target karena kebutuhan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.	Meningkatkan kinerja selaras dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	117,50	100,00		
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93,49	100,00		
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100,00	100,00	Permohonan Pemeriksaan/Penilaian Dokumen Lingkungan yang diajukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan/penilaian substansi untuk penerbitan Persetujuan Lingkungan	Merumuskan upaya pengendalian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dokumen lingkungan oleh pemohon sehingga proses penilaian/pemeriksaan melalui rapat dapat dilaksanakan
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	100,00	100,00	Capaian kinerja sudah berhasil dan tercapai bahkan melebihi target karena yang ikut seminar atau pelatihan ada 7 orang karena seminar yang diikuti dalam setahun berjumlah tiga	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	94,12	100,00	Capaian kinerja sudah berhasil dan tercapai bahkan melebihi target seharusnya 15 ini jumlahnya jadi 19 Badan Usaha dikarenakan selain dilakukan pengawasan rutin dilakukan jg pengawasan tindak lanjut dari pengaduan,, dan kasus pengaduan pada tahun 2024 ini meningkat jadi kegiatan pengawasan untuk tahun 2024 ini dilakukan untuk menindaklanjuti kasus	
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	78,57	100,00		
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100,00	100,00		
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	83,33	100,00	Berdasarkan koordinasi dengan DLH Provinsi Jatim mengadakan kegiatan Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Suku Tengger. Maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi Karifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Suku Tengger Kabupaten Pasuruan dengan Narasumber dari DLH Provinsi awa Timur, DPMD Kabupaten Pasuruan dan cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang di kabupaten Pasuruan	Penerbitan SK Peraturan Bupati diawali koordinasi dan konsultasi DPMD Kabupaten/DPMD Provinsi Jawa Timur dan DLH Provinsi Jawa Timur Pembentukan Pokja MHA Suku Tengger Sebagai berikut : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, DPMD Kab. Pasuruan, DLH Kab. Pasuruan, Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan, Dinas Pariwisata, Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Bagian Hukum Kab. Pasuruan, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang di Kabupaten Pasuruan, Tahura
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan	75,00	100,00		
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	75,00	100,00	Menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Masyarakat Hukum Adat Suku Tengger terkait pemeliharaah lingkungan hidup MHA Suku Tengger	Menjalin kemitraan dengan lembaga Masyrakat Adat Desa,Cabang Dinas Kehutanan, Akademisi dan Lembaga Masyarakat
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75,86	100,00		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,23	100,00		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100,00	100,00	Menjalin komunikasi dengan DLHK Jakarta, DLH Provinsi Jawa Timur untuk melakukan zoom meeting, melakukan pembinaan bersama Tim Adiwiyata Kabupaten Pasuruan dan mendampingi tim verlap	Sosialisasi pembinaan melibat instansi terkait (Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pasuruan) secara maksimal
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93,24	100,00		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93,37	100,00		
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00	100,00	Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan Penghargaan 100 (seratus) Piagam Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pasuruan melalui DLH Kabupaten Pasuruan	Sekolah Adiwiyata Kabupaten maju Program Adiwiyata Provinsi pada tahun berikutnya
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100,00	100,00		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100,00	100,00		
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	100,00	100,00	Penanganan Pengaduan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, sedangkan penyerapan anggaran juga sudah sesuai jadwal realisasi dan dilaksanakan seefektif mungkin	akan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80,00	100,00	Penyelesaian sengketa pada tahun 2024 telah didukung oleh realisasi anggaran dalam setiap tahapan penyelesaiannya	akan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya
Program Pengelolaan Persampahan	0,58	100,00		
	0,95	100,00		
Pengelolaan Persampahan	0,80	100,00		
	0,95	100,00		
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1,00	100,00	Realisasi sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pemenuhannya tepat waktu	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		100,00	Realisasi sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pemenuhannya tepat waktu	
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		100,00	Realisasi sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pemenuhannya tepat waktu	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		100,00	Realisasi sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pemenuhannya tepat waktu	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		100,00	Realisasi sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pemenuhannya tepat waktu	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1,00	100,00	Realisasi sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pemenuhannya tepat waktu	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1,00	100,00	Realisasi sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pemenuhannya tepat waktu	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,00	100,00	Realisasi sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pemenuhannya tepat waktu	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup. Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program dan kegiatan, dengan beberapa capaian indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencapaian Tujuan ini diperoleh melalui indikator persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Masing-masing capaian kinerja indikator tersebut adalah:

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	Target Akhir 2025
1	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	1,11%	0,64%	57,66%	18,18%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap tujuan Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menunjukkan predikat “Rendah” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 57,66% dengan realisasi kinerja 0,64 dari target 1,11. Dikarenakan salah satu dari formulasinya yaitu nilai IKLH capaiannya mengalami penurunan sebesar 0,41% dari tahun sebelumnya dikarenakan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) capaiannya tidak memenuhi target. Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator kinerja antara lain:

- Terjadi penurunan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024, hal ini disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara pada daerah padat transportasi dengan sumber pencemar tertinggi dari kendaraan bermotor dan kurangnya tegakan pohon (titik sampling exit tol Grati, jalur lalu lintas Pasuruan Probolinggo, Jalur lalu lintas Pasuruan Malang, Jalur lalu lintas Pasuruan Surabaya) sehingga selanjutnya perlu dilakukan upaya berupa penanaman

pohon di area jalur padat transportasi dan kebijakan pemenuhan kualitas emisi kendaraan bermotor.

- b. Terjadi penurunan indeks kualitas tutupan lahan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dikarenakan terdapat kesalahan teknis penetapan deliniasi tutupan vegetasi yang diajukan pada aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup, dimana pada verifikasi tahun 2023 deliniasi tutupan lahan telah diverifikasi dan termasuk dalam perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan signifikan nilai IKTL dibandingkan tahun 2022. Tetapi pada tahun 2024 saat dilakukan verifikasi ulang, sebagian deliniasi direject oleh verifikasi dikarenakan terdapat tumpang tindih deliniasi dan titik koordinat dalam satu wilayah, sehingga luasan tutupan vegetasi berkurang dan IKTL tahun 2024 mengalami penurunan akibat penyesuaian data deliniasi dimaksud. Selanjutnya perlu adanya upaya peningkatan akurasi dalam inventerisasi dan deliniasi tutupan lahan.

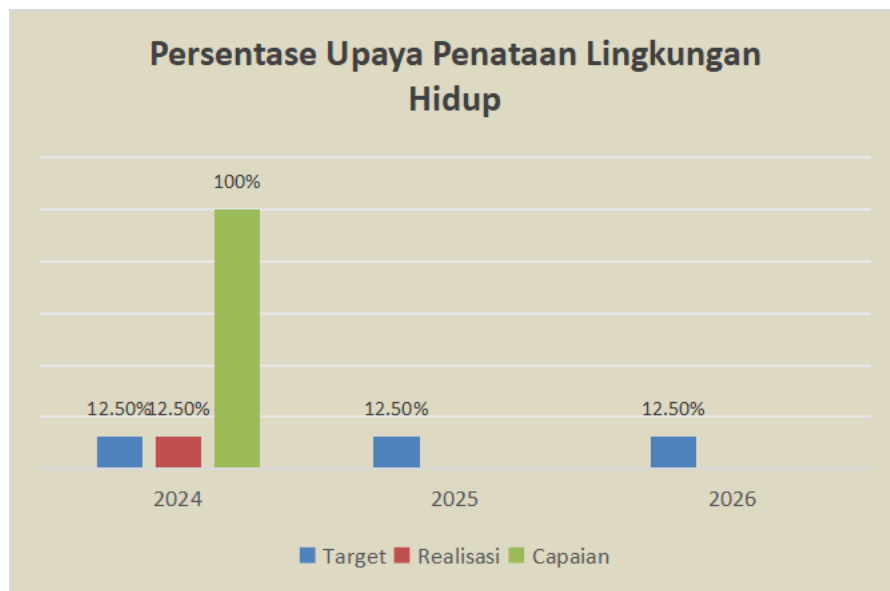
Solusi/upaya untuk menurunkan pencemaran udara dari sektor transportasi, perlu pendekatan kebijakan lintas sektor yang mengatur lebih ketat terkait aturan moda transportasi pribadi untuk bisa dikembangkan moda transportasi umum, pengaturan rekayasa lalu lintas untuk pengendalian emisi gas buang kendaraan, kebijakan bahan bakar ramah lingkungan non bahan bakar fosil. Optimalisasi upaya peningkatan tutupan vegetasi harus tetap dilakukan secara kontinyu mengingat target IKTL terus meningkat setiap tahunnya, yang mana dari hasil perhitungan/konversi nilai indeks ke satuan luas, 41 setiap kenaikan 0,1 poin nilai IKTL di Kabupaten Pasuruan setara dengan penambahan sekitar 300 Ha tutupan lahan berupa tajuk vegetasi dengan usia minimal sekitar 3 tahun. kerjasama dengan Perusahaan Pengambil air bawah tanah di Kab. Pasuruan untuk mempertahankan cadangan air bawah tanah dengan melalui penanaman daerah konservasi akan terus ditingkatkan. Upaya lainnya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan nilai IKTL antara lain dengan tetap menjaga luasan kawasan hutan dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng >25%, sempadan sungai, danau, dan pantai), melakukan konversi tutupan belukar menjadi tutupan hutan pada kawasan hutan dan kawasan yang memiliki fungsi lindung. Selanjutnya, kabupaten/kota dapat mendukung peningkatan nilai IKTL tersebut dengan menambah luas tutupan Ruang Terbuka Hijau, mendorong program reklamasi pasca tambang dan melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis.

2. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran meningkatnya meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperoleh melalui indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	Target Akhir 2025
1	Persentase upaya penataan lingkungan hidup	Persen	12,50%	12,50%	100%	12,50%
2	Persentase upaya pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3	Persen	52,17%	56,20%	107,72%	64,55%
3	Persentase upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	55%	76,60%	139,27%	60%
4	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	46,67%	80,40%	172,27%	53,33%

a. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup



Gambar 2.1 Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup

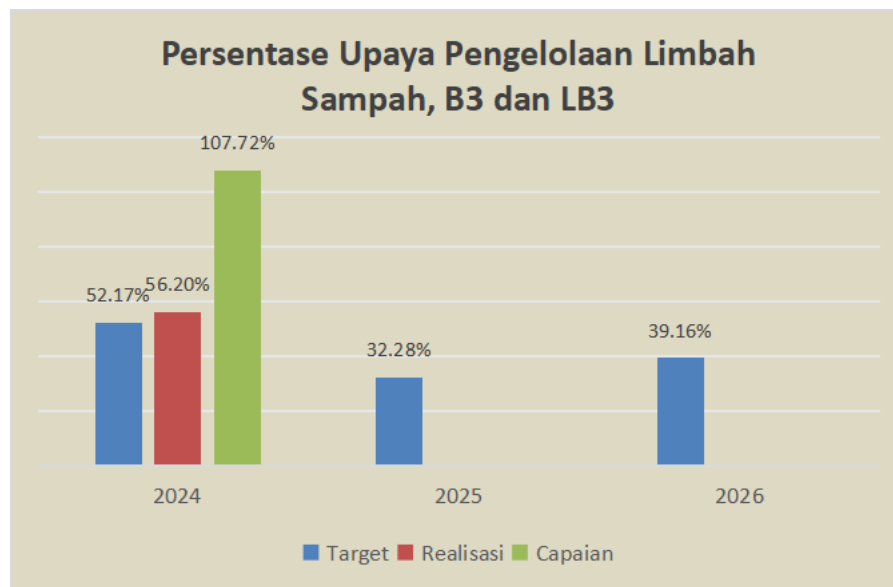
Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 12,5 dari target 12,5. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

1. Terdapat upaya dari desa/kelurahan untuk menjadikan taman sebagai ekowisata yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan desa
2. Kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai ruang interaksi publik menjadikan pembangunan RTH masuk prioritas pengusulan rencana pembangunan

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Memfasilitasi perbaikan/peningkatan kualitas dan kuantitas taman yang ada di desa/kelurahan melalui pengusulan dalam kamus OPD

b. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3



Gambar 2.2 Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3

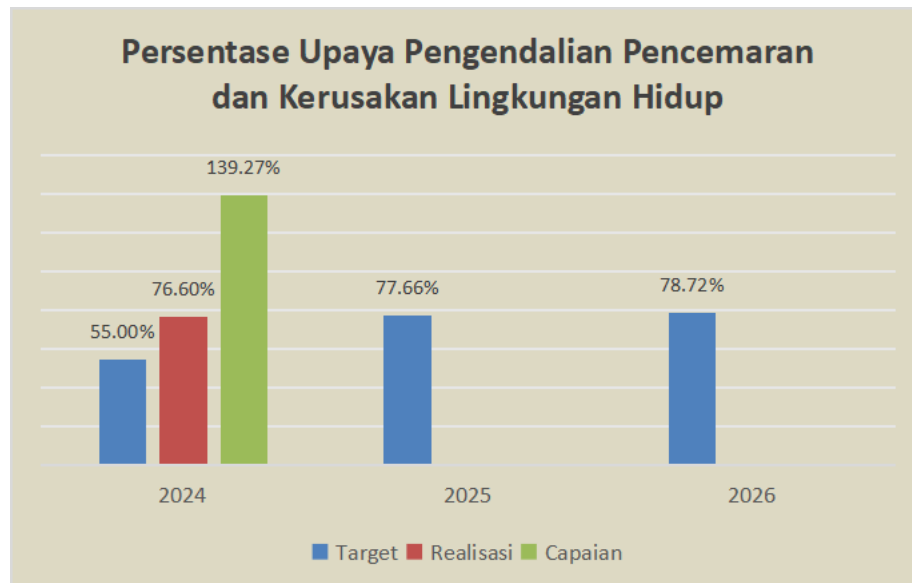
Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 107,72% dengan realisasi kinerja 56,2 dari target 52,17. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi dengan mengundang perwakilan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pasuruan.
2. Menjadi narasumber pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan desa/kelurahan/industri/sekolah dll.
3. Mendorong perkembangan TPS 3R dan bank sampah dengan memberikan akses kepada *offtaker*/industri daur ulang.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Membuat kerangka acuan kerja (KAK) dengan mempertimbangkan antara lain sumber daya manusia, jumlah anggaran, waktu, tempat pelaksanaan dan risiko yang akan dihadapi.
2. Melakukan kolaborasi baik internal Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan pihak lain seperti pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

c. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



Gambar 2.3 Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 139,27% dengan realisasi kinerja 76,6 dari target 55. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

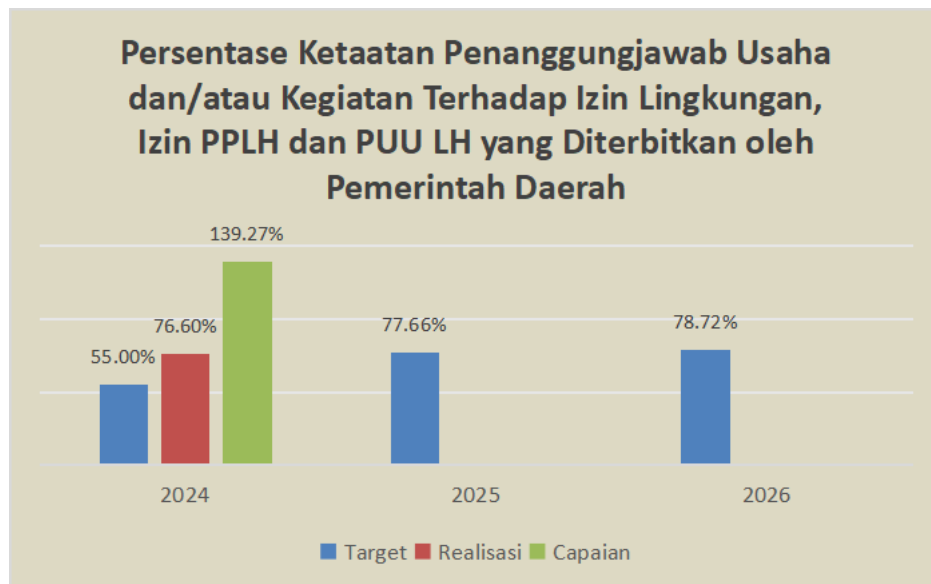
1. Terlaksananya pemantauan kualitas air Sungai di 27 titik dan pemantauan kualitas udara ambien di 20 titik pada waktu, lokasi dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan;
2. Terlaksananya pembinaan pengendalian pencemaran air dan udara pada pelaku usaha dan /atau kegiatan untuk meningkatkan kualitas air dan udara;
3. Terlaksananya Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas air dan udara.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar instansi dan stakeholder dalam pengendalian pencemaran air dan udara;

2. Optimalisasi keterlibatan Masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan udara.

d. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah



Gambar 2.4

Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 173,01% dengan realisasi kinerja 80,4 dari target 46,47. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

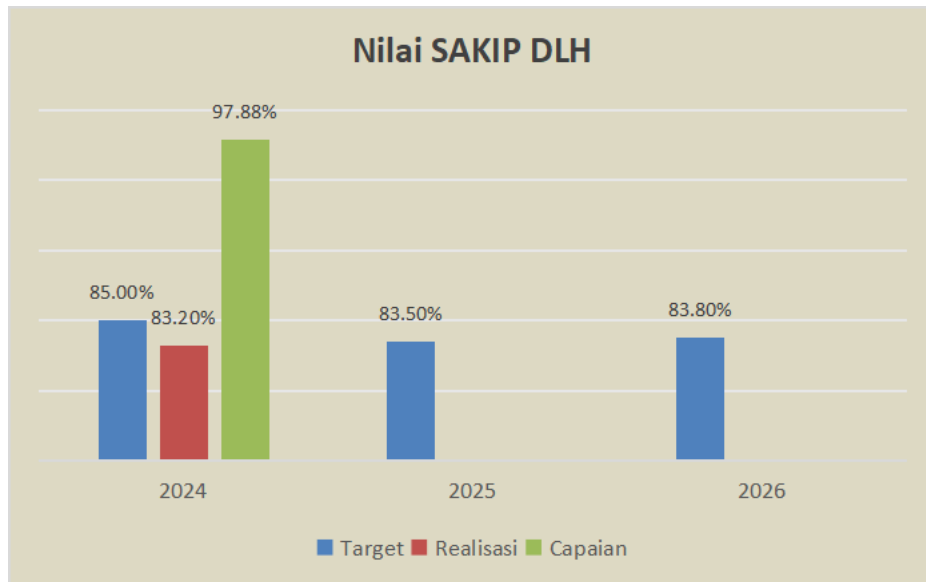
1. Jumlah Pengawasan di Tahun 2024 bertambah dikarenakan ada tambahan pendampingan pengawasan dari kewenangan Provinsi dan KLHK.
2. Adanya tambahan pengawasan tidak langsung sesuai dengan laporan UKL – UPL.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam

pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Adanya penambahan SDM pengawasan di Tahun 2025
2. Adanya penambahan pelatihan – pelatihan untuk mengembangkan kapasitas SDM PPLH

3) Sasaran Strategis Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Gambar 2.5 Nilai SAKIP DLH Tahun 2024-2026

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai SAKIP DLH menunjukkan predikat “sangat tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 97,88% dengan realisasi kinerja 83,2 dari target 85, bahwasannya Nilai SAKIP DLH tahun 2024 realisasinya tidak memenuhi target. Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator kinerja antara lain :

1. Pada salah satu komponen atau kriteria yaitu pengukuran kinerja yang turun 0,9 poin.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang tidak hanya menantang tetapi juga realistis dan dapat dicapai dengan mengacu pada tren kenaikan

capaian tahun-tahun sebelumnya.

2. Menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja, frekuensi pengumpulan data, mekanisme perhitungan, media yang digunakan serta sistem pengukuran kinerja.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup			12,50%	12,50%	12,50%	16,67%	12,50%		12,50%	16,67%	
2	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3			52,17%	32,28%	39,16%	45,35%	56,20%		39,16%	45,35%	
3	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			55%	76,80%	77,00%	77,20%	76,60%		77,00%	77,20%	
4	Persentase Upaya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			46,67%	80,43%	80,57%	80,62%	80,40%		80,57%	80,62%	
5	Nilai Sakip DLH			85	83,5	83,8	84	83,2		83,8	84	
IKK OUTCOME												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan		V	62,504	71,68	71,76	71,84	65,06		71,76	71,84	
a	Indeks Kualitas Air (IKA)		V	53,59	72,05	72,15	72,25	59,72		72,15	72,25	
b	Indeks Kualitas Udara (IKU)		V	81,04	78,68	78,78	78,88	80,52		78,78	78,88	
c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		V	43,53	58,12	58,12	58,12	45,64		58,12	58,12	
2	Terlaksananya Pengelolaan Smapah di Wilayah Kabupaten		V	45,00%	30,00%	32,30%	34,50%	35,93%		11,30%	14,10%	
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin		V	46,67%	20,63%	19,71%	18,77%	20,00%		85%	85%	

note :
kolom 3 dan 4 : jika ada standar yang diatur oleh kementerian, silahkan tuliskan nilainya

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Pembiayaan pengelolaan sampah ditingkat desa/kelurahan tidak mencukupi untuk penuntasan permasalahan sampah diwilayah tersebut.
2. Sarana prasarana pengelolaan sampah ditingkat desa/kelurahan tidak memadai mulai dari sarana prasarana pengomposan dan pemilahan dari sumber, kendaraan pengumpul sampah, serta TPS 3R dan peralatannya.
3. Kurang kompetensi lembaga pengelola sampah di tingkat masyarakat
4. Kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup yang memenuhi kompetensi baik teknis maupun non teknis dalam pengelolaan sampah
5. Kurangnya sarana dan prasarana pengolah limbah/sampah pada pelaku usaha kecil/mikro di sektor pertanian, peternakan dan perikanan terkait pengelolaan limbah hasil produksi
6. Kurang pahamnya pelaku usaha sektor pertanian, peternakan, dan perikanan tentang pengelolaan limbah dan sampah yang dihasilkan menjadi produk yang bermanfaat untuk pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
7. Masih rendahnya izin berusaha pada UMKM

8. Kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah dari usaha sektor peternakan
9. Kurangnya pemahaman masyarakat (pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, dan peternakan) terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3, sehingga potensi terjadi pencemaran limbah B3
10. Kurang optimalnya kondisi RTH di Kabupaten Pasuruan untuk difungsikan sebagai sarana rekreasi
11. Kurangnya optimalnya peran masyarakat dalam menata dan memelihara RTH di kawasan permukiman
12. Masih luasnya lahan kritis di Kabupaten Pasuruan
13. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat saluran dan sungai sebagai ekosistem pendukung, sehingga saluran dan sungai tercemar
14. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan di atas, dirumuskan prioritas pembangunan dan proyek strategis urusan lingkungan hidup yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2023 adalah 1.634.022 Jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka menghasilkan bebensampah yang besar pula. Diasumsikan di Tahun 2023 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 3.374.734 kg per hari atau setara dengan dengan 4.707 m³ /hari. Volume timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2018 sebesar ± 1.636.124 m³ per tahun. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 819 m³ /hari atau sekitar 17,4 % dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3 R, bank sampah dan sektor informal lain adalah sekitar 178,9 m³ /hari atau sekitar 3,8%, dan sisanya sebesar 78,8% atau 3709,1 m³ /hari tidak dikelola. Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 2 (dua) unit Tempat Pengolahan Akhir sampah yang berlokasi di Desa Kenep Kecamatan Beji dan Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, 38 unit TPS 3R, 44 unit bank sampah dan sekitar 40 lapak atau pengelola sampah (sektor informal) yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 10 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada.

Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA berskala Kabupaten Pasuruan yang ada dan berfungsi saat ini adalah TPA Wonokerto di Kecamatan Sukorejo dengan

luas sekitar 4,8 Ha. TPA Wonokerto memiliki kapasitas sebesar 2.000.000 m³ dan saat ini menampung volume eksisting tahun 2023 yaitu 400.000 m³. berdasarkan posisi hanya efisien untuk melayani wilayah bagian Utara-Barat Kabupaten Pasuruan (Kec. Beji, Gempol, Bangil, Kraton, Rembang, Pohjentrek dan Pandaan).

Saat ini kondisi operasional di TPA Wonokerto khususnya sel 1 sudah overload, sehingga sesuai dengan DED pembangunan TPA Wonokerto membutuhkan pembangunan sel 2 serta membutuhkan tambahan sarana dan prasarana pendukungnya atau optimalisasi TPA Wonokerto.

2. Meningkatnya tutupan lahan dan Ruang Terbuka hijau;

Berdasarkan data tahun 2024 tentang jumlah luasan ruang terbuka hijau publik mencapai 9,4 ha atau 0,00639% dari total luas Kabupaten Pasuruan. Hal ini belum memenuhi ketentuan jumlah luasan ruang terbuka hijau publik yang harus dicapai sebesar 30% dari total luas lahan. Selain luasan RTH yang kurang, terdapat RTH yang selain berfungsi sebagai kawasan resapan air juga merupakan landmark Kabupaten Pasuruan yaitu Alun-alun Bangil, dimana kondisinya kurang optimal sebagai perwujudan landmark, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi Alun-alun Bangil untuk menunjang Kecamatan Bangil sebagai Ibukota Kabupaten.

3. Menurunnya luasan lahan kritis.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 11 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2044, kawasan hutan lindung milik negara yang dikelola oleh PT. Perhutani yang terletak di Wilayah Kabupaten Pasuruan adalah seluas 7.225,30 Ha yang terletak menyebar di Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Pasrepan.

Kondisi saat ini lahan kritis di area atau kawasan penyangga semakin tinggi, yang dapat mengakibatkan bencana banjir bandang serta penurunan cadangan air bawah tanah, maka kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui metode revegetasi dan sipil teknis sangat diperlukan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Ranwal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Rancangan awal Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Ranwal Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengusung tema Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 mengusung tema **“Hilirisasi industri pengolahan potensi unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan”**. Prioritas pembangunan ditetapkan sejumlah 4 (empat) prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kerja yang berdaya saing;
2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku ;
3. Pengembangan industri Pengolahan unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang kompetitif;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mengambil peran dalam mendukung prioritas pembangunan nomor 2 (dua), yaitu **“Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku”** dan nomor 4 (empat) yaitu **“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital”**

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 11 program 23 kegiatan 74 sub kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2025 seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis 2024-2026 yang telah disusun, namun sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan, serta mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2026 :

Jumlah Program	: 11 Program
Jumlah Kegiatan	: 23 kegiatan
Jumlah Sub kegiatan	: 74 sub kegiatan

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
sesuai Renstra 2025-2029						sesuai kebutuhan tahun rencana					
I	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	60%	Rp178.700.000,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang	60%	Rp178.700.000,00	
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun	6 dokumen	Rp168.700.000,00	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun	6 dokumen	Rp168.700.000,00	
1.1	Subkegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	1 dokumen	Rp10.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	1 dokumen	Rp10.000.000,00	
1.2	Subkegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	5 dokumen	Rp158.700.000,00	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	5 dokumen	Rp158.700.000,00	
2	Kegiatan Penyeleggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KLHS yang Tersusun	1 dokumen	Rp10.000.000,00	Kegiatan Penyeleggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KLHS yang Tersusun	1 dokumen	Rp10.000.000,00	
2.1	Subkegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 dokumen	Rp10.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 dokumen	Rp10.000.000,00	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	25,44%	Rp1.381.892.300,00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	25,44%	Rp1.381.892.300,00	
3	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara	3,61%	Rp991.299.800,00	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara	3,61%	Rp991.299.800,00	
3,1	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	Rp50.100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	Rp50.100.000,00	
3,2	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	28 kegiatan	Rp50.100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	28 kegiatan	Rp50.100.000,00	
3,3	Subkegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	25 laporan	Rp15.100.000,00	Subkegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	25 laporan	Rp15.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3,4	Subkegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pasuruan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	94 lokasi	Rp208.000.000,00	Subkegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pasuruan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	94 lokasi	Rp208.000.000,00	
3,5	Subkegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/ kota yang dilakukan pemeliharaan	2 unit	Rp150.000.000,00	Subkegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/ kota yang dilakukan pemeliharaan	2 unit	Rp150.000.000,00	
3,6	Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	1229 dokumen	Rp517.999.800,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	1229 dokumen	Rp517.999.800,00	
4	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1,37%	Rp70.192.500,00	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1,37%	Rp70.192.500,00	
4.1	Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	50 laporan	Rp50.100.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	50 laporan	Rp50.100.000,00	
4.2	Subkegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 titik	Rp20.092.500,00	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 titik	Rp20.092.500,00	
5	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	13,70%	Rp320.400.000,00	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	13,70%	Rp320.400.000,00	
5.1	Subkegiatan Pelaksanaan remediasi	Kab. Pasuruan	Jumlah kumulatif luasan lahan terdampak kegiatan remediasi yang telah dilakukan	0,5 ha	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan remediasi	Kab. Pasuruan	Jumlah kumulatif luasan lahan terdampak kegiatan remediasi yang telah dilakukan	0,5 ha	Rp100.000,00	
5.2	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Kab. Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Kab. Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	Rp100.000,00	
5.3	Subkegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Pasuruan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	50 ha	Rp320.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Pasuruan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	50 ha	Rp320.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.4	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota	3 kegiatan	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota	3 kegiatan	Rp100.000,00	
5.5	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	50 kegiatan	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Pasuruan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	50 kegiatan	Rp100.000,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)	21,05%	Rp40.696.449.954,50	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)	21,05%	Rp40.696.449.954,50	
6	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun	1100 ha	Rp40.696.449.954,50	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun	1100 ha	Rp40.696.449.954,50	
6.1	Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 dokumen	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 dokumen	Rp100.000,00	
6.2	Subkegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Pasuruan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	1060 Ha	Rp40.696.349.954,50	Sub Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Pasuruan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	1060 Ha	Rp40.696.349.954,50	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Pasuruan	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	47%	Rp55.400.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Pasuruan	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	47%	Rp55.400.000,00	
7	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	100%	Rp30.200.000,00	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	100%	Rp30.200.000,00	
7.1	Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition) (Online/ Sinal/ Subnition)	Kab. Pasuruan	Jumlah Fasilitas pemenuhan rincian teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition)	30 dokumen	Rp20.100.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition)	Kab. Pasuruan	Jumlah Fasilitas pemenuhan rincian teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition)	30 dokumen	Rp20.100.000,00	
7.2	Subkegiatan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Pasuruan	Jumlah Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	10 kegiatan/ usaha	Rp10.100.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Pasuruan	Jumlah Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	10 kegiatan/ usaha	Rp10.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100%	Rp25.200.000,00	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100%	Rp25.200.000,00	
8.1	Subkegiatan Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	Kab. Pasuruan	Jumlah Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	1 dokumen	Rp5.100.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	Kab. Pasuruan	Jumlah Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	1 dokumen	Rp5.100.000,00	
8.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, dan/atau Penimbunan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	Rp20.100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	Rp20.100.000,00	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Pasuruan	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	60%	Rp228.200.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Pasuruan	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	60%	Rp228.200.000,00	
9	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	17.52%	Rp228.200.000,00	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	17.52%	Rp228.200.000,00	
9.1	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	17 orang	Rp20.100.000,00	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	17 orang	Rp20.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.2	Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	51 badan usaha	Rp208.100.000,00	Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	51 badan usaha	Rp208.100.000,00	
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Pasuruan	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	25%	Rp25.200.000,00	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Pasuruan	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	25%	Rp25.200.000,00	
10	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah MHA yang diakui	2 lembaga	Rp10.100.000,00	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah MHA yang diakui	2 lembaga	Rp10.100.000,00	
10.1	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2 dokumen	Rp10.100.000,00	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2 dokumen	Rp10.100.000,00	
11	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	2 lembaga	Rp15.100.000,00	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	2 lembaga	Rp15.100.000,00	
11.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 dokumen	Rp15.100.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 dokumen	Rp15.100.000,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Pasuruan	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	4,25%	Rp97.460.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Pasuruan	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	4,25%	Rp97.460.000,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	88 lembaga	Rp97.460.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	88 lembaga	Rp97.460.000,00	
12.1	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	Rp97.460.000,00	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	Rp97.460.000,00	
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Pasuruan	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	5,47%	Rp20.100.000,00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. Pasuruan	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	5,47%	Rp20.100.000,00	
13	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	5,47%	Rp20.100.000,00	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	5,47%	Rp20.100.000,00	
13.1	Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas	Rp20.100.000,00	Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas	Rp20.100.000,00	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Pasuruan	Persentase ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	100%	Rp56.700.000,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	100%	Rp56.700.000,00	
14	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Pasuruan	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100%	Rp56.700.000,00	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Pasuruan	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100%	Rp56.700.000,00	
14.1	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Kab Pasuruan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	15 pengaduan	Rp46.600.000,00	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Kab Pasuruan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	15 pengaduan	Rp46.600.000,00	
14.2	Sub kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	15 perkara	Rp10.100.000,00	Sub kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	15 perkara	Rp10.100.000,00	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Pasuruan	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap RPJPD	83.0%	Rp100.400.000,00	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap RPJPD	83.0%	Rp100.400.000,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kab. Pasuruan	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap RPJPD	50%	Rp19.972.632.939,00		Kab. Pasuruan	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap RPJPD	50%	Rp19.972.632.939,00	
15	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab. Pasuruan	Persentase capaian pengurangan sampah	11%	Rp100.400.000,00	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab. Pasuruan	Persentase capaian pengurangan sampah	11%	Rp100.400.000,00	
		Kab. Pasuruan	Persentase capaian penanganan sampah	11,30%	Rp19.972.632.939,00		Kab. Pasuruan	Persentase capaian penanganan sampah	11,30%	Rp19.972.632.939,00	
15.1	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33 kelompok	Rp10.100.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33 kelompok	Rp10.100.000,00	
15.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada RPJPD	1 dokumen	Rp30.100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada RPJPD	1 dokumen	Rp30.100.000,00	
15.3	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemrosesan Akhir	2 unit	Rp3.000.100.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemrosesan Akhir	2 unit	Rp3.000.100.000,00	
15.4	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 dokumen	Rp40.100.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 dokumen	Rp40.100.000,00	
15.5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 dokumen	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 dokumen	Rp100.000,00	
15.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 laporan	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 laporan	Rp100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.7	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	47847 ton	Rp200.000.000,00	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	47847 ton	Rp200.000.000,00	
15.8	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	30 unit	Rp163.000.000,00	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	30 unit	Rp163.000.000,00	
15.9	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui penauummulan sampah	Kab. Pasuruan	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0,25%	Rp547.332.939,00	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui penauummulan sampah	Kab. Pasuruan	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0,25%	Rp547.332.939,00	
15.10	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	48934 ton	Rp15.332.000.000,00	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	48934 ton	Rp15.332.000.000,00	
15.11	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 laporan	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 laporan	Rp100.000,00	
15.12	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	43497 ton	Rp50.000.000,00	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	43497 ton	Rp50.000.000,00	
15.13	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/ kota atau TPA/ TPST Regional	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/ kota atau TPA/ TPST Regional	47847 ton	Rp700.000.000,00	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/ kota atau TPA/ TPST Regional	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/ kota atau TPA/ TPST Regional	47847 ton	Rp700.000.000,00	
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	Rp9.936.830.145,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	Rp9.936.830.145,00	
16	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok	100%	Rp110.724.400,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok	100%	Rp110.724.400,00	
16.1	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp51.090.000,00	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp51.090.000,00	
16.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Rp7.744.400,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Rp7.744.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Rp9.525.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Rp9.525.000,00	
16.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Rp7.850.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Rp7.850.000,00	
16.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	Rp9.525.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	Rp9.525.000,00	
16.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	Rp10.440.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	Rp10.440.000,00	
16.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp14.550.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp14.550.000,00	
17	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Rp8.648.808.045,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Rp8.648.808.045,00	
17.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	Rp8.377.408.045,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	Rp8.377.408.045,00	
17.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	Rp250.100.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	Rp250.100.000,00	
17.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	Rp5.100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	Rp5.100.000,00	
17.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 laporan	Rp10.100.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 laporan	Rp10.100.000,00	
17.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Rp6.100.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Rp6.100.000,00	
18	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	Rp14.000.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	Rp14.000.000,00	
18.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	Rp14.000.000,00	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	Rp14.000.000,00	
19	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp20.100.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp20.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	Rp20.100.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	Rp20.100.000,00	
20	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	Rp370.600.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	Rp370.600.000,00	
20.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 paket	Rp50.100.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 paket	Rp50.100.000,00	
20.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp40.100.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp40.100.000,00	
20.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket	Rp30.100.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket	Rp30.100.000,00	
20.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp25.100.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp25.100.000,00	
20.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp25.100.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp25.100.000,00	
20.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp200.100.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp200.100.000,00	
21	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	Rp46.309.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	Rp46.309.000,00	
21.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Rp100.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Rp100.000,00	
21.2	Sub KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Rp100.000,00	Sub KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Rp100.000,00	
21.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Rp23.349.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Rp23.349.000,00	
21.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	Rp22.760.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	Rp22.760.000,00	
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%	Rp305.785.200,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%	Rp305.785.200,00	
22.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	Rp285.685.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	Rp285.685.200,00	
22.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Rp20.100.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Rp20.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase BMD kondisi baik	100%	Rp420.503.500,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase BMD kondisi baik	100%	Rp420.503.500,00	
23.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Rp268.342.700,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Rp268.342.700,00	
23.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Rp2.100.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Rp2.100.000,00	
23.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Rp20.060.800,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Rp20.060.800,00	
23.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp100.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp100.000.000,00	
23.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp30.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	Rp30.000.000,00	
					Rp72.749.965.338,50					Rp72.749.965.338,50	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam dan forum OPD, *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk mematangkan/memutakhirkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup, selain harus berpedoman pada Renstra yang ada, juga harus mempertimbangkan hasil Musrenbangkab/RKPD final yang mengarah pada dukungan pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2026.

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diisikan usulan Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir				
1	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap RPJPD		
			Persentase capaian target penanganan sampah terhadap RPJPD		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah		Persentase capaian pengurangan sampah		
			Persentase capaian penanganan sampah		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
		Desa Tenggilisrejo Kecamatan Gondangwetan		1 Kegiatan	Musrenbang
		Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen		1 Kegiatan	Musrenbang
		Balai desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Rebalas Kecamatan Grati		1 Kegiatan	Musrenbang
		Dusun Krajan Kecamatan Rejosari		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Rejosari Kecamatan Kraton		1 Kegiatan	Musrenbang
		Krajan Kecamatan Gondangwetan		1 Kegiatan	Musrenbang
		Jl Pandansari Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari		1 Kegiatan	Musrenbang
		Krajan Kecamatan Wonorejo		1 Kegiatan	Musrenbang
		Kebonwaris Kecamatan Pandaan		1 Kegiatan	Musrenbang
		Gambirkuning Kecamatan Karton		1 Kegiatan	Musrenbang
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas		
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun (dokumen)		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen KLHS yang Tersusun		
		Kantor Desa Carat Kecamatan Gempol		1 Kegiatan	Musrenbang
		Samping Balai Desa Tawangrejo Jogosari Kecamatan Pandaan		1 Kegiatan	Musrenbang
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis		
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3		
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3		Jumlah Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan		
		Latek Kecamatan Bangil		1 Kegiatan	Musrenbang
		Tanggulangin Kecamatan Kejayan		1 Kegiatan	Musrenbang
4	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap RPJPD		
			Persentase capaian target penanganan sampah terhadap RPJPD		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah		Persentase capaian pengurangan sampah		
			Persentase capaian penanganan sampah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemrosesan Akhir		
		Mojotengah Kecamatan Sukorejo		1 Unit	Musrenbang
		Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen		1 Unit	Musrenbang
		Pager Kecamatan Purwosari		1 Unit	Musrenbang
		Blarang Kecamatan Tuttur		1 Unit	Musrenbang
		Cangkringmalang Kecamatan Beji		1 Unit	Musrenbang
		Jl Raya Purwosari Kecamatan Purwosari		1 Unit	Musrenbang
		Plintahan Kecamatan Pandaan		1 Unit	Musrenbang
		Karangrejo Kecamatan Purwodadi		1 Unit	Musrenbang
		Curahrejo Kecamatan Kraton		1 Unit	Musrenbang
		Plintahan Kecamatan Pandaan		1 Unit	Musrenbang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kebonsari Kecamatan Pandaan		1 Unit	Musrenbang
		Desa Kandung Kecamatan Pandaan		1 Unit	Musrenbang
		Desa Kertosari Kecamatan Pandaan		1 Unit	Musrenbang
		Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil		1 Unit	POKIR
		Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil		1 Unit	POKIR
		Desa Wonokoyo Kecamatan Beji		1 Unit	POKIR
		Desa Legok Kecamatan Gempol		1 Unit	POKIR
		Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan		1 Unit	POKIR
		Desa Linggo Kecamatan Kejayan		1 Unit	POKIR
		Desa Selotambak Kecamatan Kraton		1 Unit	POKIR
		Dusun Suket Desa Nogosari Kecamatan Pandaan		1 Unit	POKIR
		Dusun Ganti Desa Sukolelo Kecamatan Prigen		1 Unit	POKIR
		Dusun Krajan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen		1 Unit	POKIR
		Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi		1 Unit	POKIR
		Dusun Baos Kidul Desa Pager			
5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan		
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (dokumen)		
		Desa Mojorejo Kecamatan Tosari		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Wonosari Kecamatan Tuttur		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Kertosari Kecamatan Purwosari		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Wonokitri Kecamatan Tosari		1 Kegiatan	Musrenbang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan		
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota (kegiatan)		
		Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil		1 Kegiatan	Musrenbang
		Bedomungal Kecamatan Bangil		1 Kegiatan	Musrenbang
		Wonorejo Kecamatan Wonorejo		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Pasinan Kecamatan Lekok		1 Kegiatan	Musrenbang
		Desa Pasinan Kecamatan Lekok		1 Kegiatan	Musrenbang
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)		
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Jumlah RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun		
	Sub Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)		
		Parerejo Kecamatan Purwodadi		1 Paket	Musrenbang
		Purwodadi Kecamatan Purwodadi		1 Paket	Musrenbang
		Balai Desa Purwodadi Baru, Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi,		1 Paket	POKIR
		Alun-alun Bangil		1 Paket	Atensi Bupati
		Alun-alun Wonorejo		1 Paket	Atensi Bupati
		Apollo Gempol		1 Paket	Atensi Bupati
		Depan Kecamatan Gondangwetan		1 Paket	Atensi Bupati
		Depan Kecamatan Pandaan		1 Paket	Atensi Bupati
		Warungdowo		1 Paket	Atensi Bupati
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
		Tanggulangi Kecamatan Kejayan		1 Kegiatan	Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 tertuang Visi abadi Indonesia diterjemahkan sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Penjabaran dari Visi abadi yang berkaitan dengan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yaitu **Visi “Berkelanjutan”** yaitu dimana kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik

Berkaitan dengan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yaitu **sasaran kelima “intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*”**, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi GRK di tahun 2010, menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Agenda pembangunan Indonesia Emas berjumlah 8 (delapan), terdapat 3 (tiga) agenda yang berkaitan dengan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Agenda kedua **“transformasi ekonomi”**, yaitu untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), **penerapan ekonomi hijau**, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan;
- 2) Agenda kelima **“Ketahanan sosial Budaya dan Ekologi”**, yaitu dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko

bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan;

- 3) Agenda ketujuh “**dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**”, yaitu menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.

Arah (tujuan) pembangunan yang berjumlah 17 (tujuh belas) terdapat 4 (empat) tujuan yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Penerapan ekonomi hijau;
- 2) Lingkungan hidup yang berkualitas;
- 3) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan;
- 4) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Tabel 3.2.A				
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah				
Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
Tujuan : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	0,64%	18,18%	17,82%
Sasaran I : Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	12,50%
	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	56,20%	32,28%	39,16%
	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	76,60%	76,80%	77,00%
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	80,40%	80,43%	80,57%
Sasaran II :Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip DLH	83,2	83,5	83,8
IKK Outcome				
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan		65,06	71,68	71,76
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	59,72	72,05	72,15
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,52	78,68	78,78
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	45,64	58,12	58,12
2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten		35,93%	30,00%	32,30%
3. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten/kota		20,00%	20,63%	19,71%

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

Indikator Sasaran RPJMD			IKU					Program	
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi					Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Kab/kota = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219x IKTL)	62,852	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	IKLH Tahun berjalan - IKLH base line (2025)	x100%	+	Persentase pengurangan sampah yang masuk ke TPA	17,82%	
				IKLH base line (2025)					
				2					
			Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)			x100%	12,50%	1.Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Jumlah Kecamatan di kabupaten					
			Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah pendampingan/ pembinaan/ sosial isasi pengelolaan B3 dan LB3 di wilayah Kabupaten Pasuruan	x100%	39,16%	1.Program pengelolaan persampahan 2.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan			
				2					
			Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu			x100%	77%	1.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan					

Indikator Sasaran RPJMD			IKU				Program
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi		Target 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
			Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan Pemda	x100%	80,57%	1.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 2.Program Pembinaan da Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 3.Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 4.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 5.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masvarakat
				Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang izin-izin lingkungannya diterbitkan Pemda			
			Nilai SAKIP DLH	Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT)		83,80	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026 akan dilakukan melalui 1 program penunjang dan 10 program utama , 23 kegiatan dan 63 sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan, serta mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra 2024-2026

3.3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

II. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

C. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

4. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
6. Sub kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
7. Subkegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
8. Subkegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/kota

9. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

D. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

10. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

11. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

E. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

12. Sub Kegiatan Pelaksanaan remediasi

13. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi

14. Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi

15. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar di kabupaten/Kota

16. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi.

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

F. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota:

17. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati

18. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

IV. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

G. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3:

19. Sub Kegiatan Fasilitasi Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/Single/Subnition);

20. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3

H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

21. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3;

22. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan;

V. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

23.Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

24.Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

J. Kegiatan Pengakuan MHA, karifan lokal, pengetahuan tradisonal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH:

25.Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA karifan lokal atau pengetahuan tradisional dan HAK kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH;

K. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

26.Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH;

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

L. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

27.Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

M. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota:

28.Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

N. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota:

29.Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

30.Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

X. Program Pengelolaan Persampahan

O. Kegiatan Pengelolaan Sampah:

31.Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;

32.Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;

33.Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;

34.Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota;

35.Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus

36.Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota;

37.Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan;

38.Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

39. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

40. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah

41. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

42. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

P. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daaerah

43.Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- 44.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 45.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahahan RKA-SKPD;
- 46.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 47.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 48.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 49.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Q. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 50Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 51.Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 52.Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD;
 - 53.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD;
 - 54. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- R. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - 55.Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD;
- S. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - 56.Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- T. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 57.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 58.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 59.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 60.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 61.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 62.Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 63.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- U. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 64.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 65.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 66.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

67.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

68. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

69.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

W. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

70.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

71.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;

72.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

73.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

74.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PEMETAAN NOMENKLATUR PROG/KEG/SUBKEG PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TERHADAP SIPD

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
Urusan : Lingkungan Hidup

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Urusan Lingkungan Hidup							Urusan Lingkungan Hidup				
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	x 100%	%		2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	x 100%	%
			Jumlah lap/dok. perencanaan lingkungan hidup sesuai regulasi yang terjamin							Jumlah lap/dok. perencanaan lingkungan hidup sesuai regulasi yang terjamin		
			Jumlah lap/dok yang harus dipenuhi							Jumlah lap/dok yang harus dipenuhi		
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun		dokumen		2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun		dokumen
2.11.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota		dokumen		2.11.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota		dokumen
2.11.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	RPPLH kabupaten/ kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi		dokumen		2.11.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	RPPLH kabupaten/ kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi		dokumen
2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Dokumen KLHS yang Tersusun	Jumlah Dokumen KLHS yang Tersusun		dokumen		2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Dokumen KLHS yang Tersusun	Jumlah Dokumen KLHS yang Tersusun		dokumen
2.11.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun		dokumen		2.11.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun		dokumen
2.11.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS untuk KRP Lainnya yang berpotensi Menimbulkan Dampak / Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang disusun		dokumen		2.11.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang disusun		dokumen
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	x 100%	persen		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	x 100%	persen
			Jumlah Pengendalian yang dilakukan kepada kegiatan usaha							Jumlah Pengendalian yang dilakukan kepada kegiatan usaha		
			Jumlah Kegiatan Usaha di Kabupaten Pasuruan							Jumlah Kegiatan Usaha di Kabupaten Pasuruan		
			Jumlah Pengendalian yang dilakukan kepada kelompok masyarakat							Jumlah Pengendalian yang dilakukan kepada kelompok masyarakat		

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
			Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan							Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan		
			2							2		
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara	Persentase meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara	x 100%	persen		2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara	Persentase meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara	x 100%	persen
			Jumlah kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media tanah, air dan udara							Jumlah kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media tanah, air dan udara		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang ada di kabupaten Pasuruan							Jumlah Kegiatan Usaha yang ada di kabupaten Pasuruan		
2.11.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup TerhadapMedia Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		dokumen		2.11.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		dokumen
2.11.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		dokumen		2.11.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		dokumen
2.11.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan		kegiatan		2.11.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan		kegiatan
2.11.03.2.01.0006	Subkegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun		laporan		2.11.03.2.01.0006	Subkegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun		laporan
2.11.03.2.01.0007	Subkegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		lokasi		2.11.03.2.01.0007	Subkegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		lokasi

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029							SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)					
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.03.2.01.0009	Subkegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/ kota	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/ kota yang dilakukan pemeliharaan		unit		2.11.03.2.01.0009	Subkegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/ kota	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/ kota yang dilakukan pemeliharaan		unit
2.11.03.2.01.0012	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan		paket		2.11.03.2.01.0012	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan		paket
2.11.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium		dokumen		2.11.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		dokumen
2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	x 100%	%		2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	x 100%	%
			Jumlah desa dan kelurahan yang telah dilakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota							Jumlah desa dan kelurahan yang telah dilakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		
			Jumlah desa dan kelurahan di kabupaten pasuruan							Jumlah desa dan kelurahan di kabupaten pasuruan		
2.11.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan		Laporan		2.11.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan		Laporan
2.11.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		Titik		2.11.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		Titik
2.11.03.2.02	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	x 100%	%		2.11.03.2.02	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	x 100%	%

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029							SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)					
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.03.2.03	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah desa yang telah dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemulihan pencemaran	x 100 %	%		2.11.03.2.03	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah desa yang telah dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemulihan pencemaran	x 100 %	%
			Jumlah desa di wilayah Kabupaten Pasuruan							Jumlah desa di wilayah Kabupaten Pasuruan		
2.11.03.2.03.0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota		ha		2.11.03.2.03.0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota		ha
2.11.03.2.03.0008	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan		kegiatan		2.11.03.2.03.0008	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dansinkronisasi remediasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan		kegiatan
2.11.03.2.03.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota		ha		2.11.03.2.03.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota		ha
2.11.03.2.03.0012	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota		dokumen		2.11.03.2.03.0012	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota		kegiatan
2.11.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan		kegiatan		2.11.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan		kegiatan
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan	x 100%	persen		2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan	x 100%	persen
			Luasan tutupan lahan tahun berjalan - luasan tutupan lahan tahun baseline							Luasan tutupan lahan tahun berjalan - luasan tutupan lahan tahun baseline		
			Luasan tutupan lahan tahun baseline							Luasan tutupan lahan tahun baseline		
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Meningkatnya RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun	Jumlah RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun		ha		2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pasuruan setiap tahun	Jumlah RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun		ha
2.11.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		dokumen		2.11.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		dokumen

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.04.2.01.0004	Sub Kegiatan pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota		ha		2.11.04.2.01.0004	Sub Kegiatan pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota		ha
2.11.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota		unit		2.11.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota		unit
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	x 100%	%		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	x 100%	%
			Σ Kegiatan Pendampingan/ Pembinaan/ Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan							Σ Kegiatan Pendampingan/ Pembinaan/ Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan		
			Σ (Kecamatan/ Desa/ Usaha dan/ atau Kegiatan/ Lembaga pemerintah)							Σ (Kecamatan/ Desa/ Usaha dan/ atau Kegiatan/ Lembaga pemerintah)		
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	Persentase pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	x 100%	%		2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	x 100%	%
			teknis penyimpanan Limbah B3 yang disusun oleh pelaku usaha							teknis penyimpanan Limbah B3 yang disusun oleh pelaku usaha		
			Jumlah permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang masuk							Jumlah permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang masuk		
2.11.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen		2.11.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition)	Terfasilitasinya pemenuhan rincian teknis untuk penyimpanan sementara limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition)	Jumlah Fasilitasi pemenuhan rincian teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition)		dokumen
2.11.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		laporan		2.11.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Jumlah Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan		usaha
			Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten							Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten		

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.05.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	Jumlah penerbitan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 sekala Kabupaten	x 100%	%		2.11.05.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	Jumlah penerbitan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 sekala Kabupaten	x 100%	%
			Jumlah permohonan persetujuan teknis dan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang masuk							Jumlah permohonan persetujuan teknis dan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang masuk		
2.11.05.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah serta Pelaksanaan Daerah Pengumpulan Kabupaten/ Kota dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah serta Pelaksanaan Pemda Pengumpulan Kabupaten/ Kota dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		dokumen		2.11.05.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		dokumen
2.11.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen		2.11.05.2.02.0006	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	Jumlah Fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3		dokumen
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	x 100%	persen		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	x 100%	persen
			Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan Pemda							Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan Pemda		

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029							SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)					
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan							Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan		
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	x 100%	persen		2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	x 100%	persen
			Jumlah kumulatif Pengawasan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan							Jumlah kumulatif Pengawasan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan		
			Jumlah seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan yang izinnya diterbitkan Pemkab. Pasuruan (sasaran/objek pengawasan)							Jumlah seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan yang izinnya diterbitkan Pemkab. Pasuruan (sasaran/objek pengawasan)		
2.11.06.2.01.0007	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		orang		2.11.06.2.01.0007	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		orang
2.11.06.2.01.0009	Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi		badan usaha		2.11.06.2.01.0009	Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi		badan usaha
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	x 100%	persen		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	x 100%	persen
			Jumlah MHA yang Diakui oleh pemerintah Desa							Jumlah MHA yang Diakui oleh pemerintah Desa		
			Jumlah potensi desa adat (MHA)							Jumlah potensi desa adat (MHA)		
2.11.07.2.01	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya MHA yang diakui	Jumlah MHA yang diakui		lembaga		2.11.07.2.01	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya MHA yang diakui	Jumlah MHA yang diakui		lembaga

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029							SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)					
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.07.2.01.0001	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		dokumen		2.11.07.2.01.0001	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		dokumen
2.11.07.202	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas		lembaga		2.11.07.202	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas		lembaga
2.11.07.202.0001	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		dokumen		2.11.07.202.0001	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		dokumen
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	x 100%	persen		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	x 100%	persen
		Jumlah Kelompok / Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya										
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten										
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		lembaga		2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		lembaga
2.11.08.2.01.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		dokumen		2.11.08.2.01.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		dokumen

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	x 100%	persen		2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	x 100%	persen
			Jumlah Kelompok / Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya							Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten		
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi Jumlah Perusahaan, sekolah, pondok pesantren yg kinerja PPLH nya baik/sangat baik	x 100%	persen		2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Meningkatnya Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi Jumlah Perusahaan, sekolah, pondok pesantren yg kinerja PPLH nya baik/sangat	x 100%	persen
			Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten							Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten		
2.11.09.2.01.0001	Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Linakunaan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrop hi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		entitas		2.11.09.2.01.0001	Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Linakunaan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembag a Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Linakunaan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrop hi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		entitas
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	Persentase ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	x 100%	persen		2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	Persentase ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	x 100%	persen
			Dokumen hasil tindak lanjut penanganan pengaduan melalui koordinasi dan sinkronisasi penerapan Sanksi Administasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan							Dokumen hasil tindak lanjut penanganan pengaduan melalui koordinasi dan sinkronisasi penerapan Sanksi Administasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		
			pengaduan bidang PPLH yang ditindaklanjuti							pengaduan bidang PPLH yang ditindaklanjuti		
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	Meningkatnya penanganan pengaduan	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	x 100%	persen		2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat di	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	x 100%	persen

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	jumlah pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti					pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	jumlah pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti		
			jumlah pengaduan di bidang PPLH yang masuk							jumlah pengaduan di bidang PPLH yang masuk		
2.11.10.2.01.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani		pengaduan		2.11.10.2.01.0009	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola		pengaduan
2.11.10.2.01.0005	Sub kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota		perkara		2.11.10.2.01.0005	Sub kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota		perkara
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	x 100%	persen		2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	x 100%	persen
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya capaian pengurangan sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	x 100%	persen	2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya capaian pengurangan sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	x 100%	persen	
			Jumlah sampah yang tertangani di TPA Kab. Pasuruan						Jumlah sampah yang tertangani di TPA Kab. Pasuruan			
		Meningkatnya capaian penanganan sampah	Persentase capaian penanganan sampah	x 100%	persen			Meningkatnya capaian penanganan sampah	Persentase capaian penanganan sampah	x 100%	persen	
			tertangani di Fasilitas Pengolahan Sampah						tertangani di Fasilitas Pengolahan Sampah			
			Jumlah timbulan sampah Kab. Pasuruan						Jumlah timbulan sampah Kab. Pasuruan			
2.11.11.2.01.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		kelompok		2.11.11.2.01.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		kelompok

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.11.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		dokumen		2.11.11.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		dokumen
2.11.11.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		unit		2.11.11.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		unit
2.11.11.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan		dokumen		2.11.11.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan		dokumen
2.11.11.2.01.0010	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani		dokumen		2.11.11.2.01.0027	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus		dokumen
2.11.11.2.01.0011	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota		dokumen		2.11.11.2.01.0011	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota		dokumen
2.11.11.2.01.0012	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		ton		2.11.11.2.01.0012	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		ton

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		unit		2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		unit
2.11.11.2.01.0016	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah		persentase		2.11.11.2.01.0016	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah		persentase
2.11.11.2.01.0017	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		ton		2.11.11.2.01.0017	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		ton
2.11.11.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		laporan		2.11.11.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		laporan

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.11.2.01.0019	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang		ton		2.11.11.2.01.0019	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang		ton
2.11.11.2.01.0020	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		ton		2.11.11.2.01.0020	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		ton
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	x 100%	persen		2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	x 100%	persen
			Jumlah lap/dok adm PD yang akurat/sesuai regulasi dibagi							Jumlah lap/dok adm PD yang akurat/sesuai regulasi dibagi		
			jumlah lap/dok yang harus dipenuhi (lap/dok adm adalah yang dimaksud pada kegiatan)							jumlah lap/dok yang harus dipenuhi (lap/dok adm adalah yang dimaksud pada kegiatan)		
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegi atan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	x 100%	persen		2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegi iatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	x 100%	persen
			jml indikator kinerja prog/keg/sub keg yg konsisten pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi dibagi							jml indikator kinerja prog/keg/sub keg yg konsisten pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi dibagi		
			jumlah indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan							jumlah indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan		
2.11.01.2.01.0001	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		2.11.01.2.01.0001	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen
2.11.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		2.11.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029							SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)					
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		2.11.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen
2.11.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		2.11.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen
2.11.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		2.11.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen
2.11.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		2.11.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan
2.11.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		2.11.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	PersPersentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	x 100%	persen		2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	PersPersentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	x 100%	persen
			jml laporan keuangan yg sesuai dgn ketentuan dibagi							jml laporan keuangan yg sesuai dgn ketentuan dibagi		
			jml laporan harus dipenuhi							jml laporan harus dipenuhi		
2.11.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/ bulan		2.11.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/ bulan
2.11.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen		2.11.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen
2.11.01.2.02.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		2.11.01.2.02.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		laporan		2.11.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		laporan
2.11.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		2.11.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen
2.11.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan/ dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	Persentase laporan/ dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	x 100%	persen		2.11.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan/ dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	Persentase laporan/ dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	x 100%	persen
		jml laporan/ dok BMD yg akurat dibagi							jml laporan/ dok BMD yg akurat dibagi			
		jml lap/ dok BMD yg harus							jml lap/ dok BMD yg harus			
2.11.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		2.11.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen
2.11.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	x 100%	persen		2.11.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	x 100%	persen
		jml dok kepegawaian yg akurat dan sesuai ketentuan dibagi							jml dok kepegawaian yg akurat dan sesuai ketentuan dibagi			
		jml dok kepegawaian yg harus dipenuhi							jml dok kepegawaian yg harus dipenuhi			
2.11.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang		2.11.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan umum PD	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	x 100%	persen		2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan umum PD	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	x 100%	persen
		jml kebutuhan umum PD yg dipenuhi dibagi							jml kebutuhan umum PD yg dipenuhi dibagi			
		jml rencana kebutuhan yg harus dipenuhi							jml rencana kebutuhan yg harus dipenuhi			
2.11.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		2.11.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029							SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)					
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		2.11.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket
2.11.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket		2.11.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket
2.11.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		2.11.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket
2.11.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		laporan		2.11.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		laporan
2.11.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		2.11.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan
2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan BMD yang terealisasi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi jumlah unit yang direalisasi dibagi jumlah unit yang direncanakan	x 100%	persen		2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan BMD yang terealisasi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi jumlah unit yang direalisasi dibagi jumlah unit yang direncanakan	x 100%	persen
2.11.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		unit		2.11.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		unit
2.11.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit		2.11.01.2.07.0002	Sub KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit
2.11.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		2.11.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit
2.11.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit		2.11.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia jml jasa penunjang operasional kantor yg tersedia dibagi jml jasa penunjang operasional kantor yg ditargetkan	x 100%	persen		2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia jml jasa penunjang operasional kantor yg tersedia dibagi jml jasa penunjang operasional kantor yg ditargetkan	x 100%	persen

SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) - Draft rankhir Renstra 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator		Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
2.11.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		2.11.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan
2.11.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan		2.11.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya BMD kondisi baik	Persentase BMD kondisi baik	x 100%	persen		2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya BMD kondisi baik	Persentase BMD kondisi baik	x 100%	persen
			jml BMD kondisi baik dibagi							jml BMD kondisi baik dibagi		
			jml BMD yg terregister							jml BMD yg terregister		
2.11.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		2.11.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit
2.11.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit		2.11.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit
2.11.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		2.11.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit
2.11.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		unit		2.11.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		unit
2.11.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		unit		2.11.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		unit

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah tahun 2026

Prioritas pembangunan Daerah tahun 2026 yaitu mendukung prioritas pembangunan nomor 2 (dua), yaitu **“Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku”**, nomor 3 (tiga) **“Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif”** dan nomor 4 (empat) yaitu **“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital”**

Dinas Lingkungan Hidup melakukan intervensi melalui program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Persampahan
Pelayanan persampahan menjadi pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)
Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau di Kabupaten Pasuruan akan meningkatkan kualitas air dan udara yang merupakan bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Kualitas air permukaan dan udara yang bersih dan sehat akan berdampak pada akses pelayanan dasar masyarakat.
4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Pemenuhan persyaratan dasar sektor lingkungan hidup terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi kegiatan UMKM.
5. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
Peningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup
6. Program Pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pegiat lingkungan hidup
Bentuk pelatihan dan pendampingan menciptakan sumber daya lokal yang bisa memperkuat implementasi kebijakan atau program unggulan
7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Menjamin pengelolaan B3 dan limbah B3 secara aman, tertib, dan sesuai regulasi
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan

3.3.3 Program Kegiatan dan Sub kegiatan pendukung prioritas Daerah tahun 2026

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak produktif.

Berdasarkan data penggunaan lahan dapat diketahui luas total lahan yang tidak tertutup adalah mencapai 124.206,96 m² atau sekitar 83,33%. Lahan yang tidak tertutup bangunan, seperti hutan, kebun campuran, lahan kosong, perkebunan, sawah, semak belukar, taman kota dan tegalan/ ladang.

Tabel 3.3

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
Penurunan emisi GRK Kumulatif	Hilirisasi industri pengolahan potensi unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	PPD 2 : Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku	BAHAN BAKU - Pengembangan Teknologi budidaya produk pertanian, peternakan dan perikanan	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10. Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10. Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10. Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
					Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10. Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Hilirisasi industri pengolahan potensi unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	PPD 3 : Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif	INFRASTRUKTUR - Instalasi penanganan limbah produksi bahan baku	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12. IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
					Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12. IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12. IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12. IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
					Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12. IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Hilirisasi industri pengolahan potensi unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PPD 4 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	BERKELANJUTAN - Konservasi Sumberdaya Air, Tanah dan Udara	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	24. RTH dan atau taman bermain di setiap kecamatan
				Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Pelaksanaan remediasi	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	14. Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	14. Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
				Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	14. Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	14. Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	14. Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	14. Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan	9. Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan
				Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Pendampingan Gerakan Peduli LH	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3.Santripreneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis ponpes
				Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Perencanaan Lingkungan Hidup	19.Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
				Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
				Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Fasilitasi Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/Single/Subnition)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	19.Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
				Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	19.Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
				Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
				Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
				Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	27.Penataan kawasan ibukota Bangil

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan	27.Penataan kawasan ibukota Bangil
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan	27.Penataan kawasan ibukota Bangil
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan	27.Penataan kawasan ibukota Bangil
				Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan	27.Penataan kawasan ibukota Bangil

3.3.4 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Inovasi Perangkat daerah

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan optimalisasi 10 (sepuluh) program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Persampahan, Pengendalian B3 dan LB3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Penanganan Pengaduan LH, Pembinaan & Pengawasan LH, Pengakuan keberadaan MHA terkait PPLH, Peningkatan Pendidikan dan pelatihan LH untuk Masyarakat, Peningkatan penghargaan LH untuk Masyarakat. optimalisasi program tersebut dilakukan dengan penguatan keterlibatan masyarakat dan lintas sektor, masalah lingkungan yang luas tidak akan bisa diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri tanpa melibatkan lintas sektor, serta optimalisasi system informasi berbasis spasial yang menampung semua upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan lintas sektor.

Aplikasi lingkungan berbasis spasial tersebut diberi nama YUK SALIMAH yaitu inovasi pengelolaan sampah dan BAJUMAS yaitu sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

Yuk Salimah (Yuk Kelola Sampah dan Limbah Menjadi Berkah). Permasalahan sampah menjadi perhatian serius bagi banyak pihak di seluruh dunia, dan di Kabupaten Pasuruan pun hal ini tidak luput dari perhatian. Berbagai langkah luar biasa telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, dan semua upaya tersebut patut diapresiasi Tujuannya untuk memperkuat komitmen dan peran aktif kepada masyarakat. Dan juga untuk membangun rantai perekonomian pemukiman dan juga industri.

BAJUMAS (Pembayaran Jasa Lingkungan Untuk Kemaslahatan)

Dampak BAJUMAS :

1. Dampak Ekonomi

- A. Bagi masyarakat yang menjadi penyedia jasa lingkungan sangat membantu dalam meningkatkan penghasilan.
- B. Bagi perusahaan yang menjadi pemanfaat jasa lingkungan sangat membantu dalam upaya branding lingkungan disamping sebagai upaya memastikan keberlanjutan usaha.

2. Dampak Sosial

A. Masyarakat merasa dihargai atas upayanya dalam pelestarian lingkungan

B. Jaringan pengaman sosial yang sangat dibutuhkan perusahaan akan terbentuk dan terjalin

3. Dampak lingkungan

A. Trigger dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

B. Solusi bagi pembiayaan-pembiayaan terkait pelestarian lingkungan

Manfaat BAJUMAS :

- Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
- Terciptanya keseimbangan sosial ekonomi masyarakat

Keberlanjutan BAJUMAS :

1. Dari segi program BAJUMAS akan terus berlanjut karena didukung perangkat hukum yang memadai dengan disahkan dan diberlakukannya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 224 Tahun 2023 tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.
2. Dari segi pengembangan masih memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan terutama terkait sistem informasi PJLH yang bisa mengekspos dan mengeksplorasi potensi penyedia maupun pemanfaat PJLH
3. BAJUMAS sangat minim dalam pembiayaan APBD sehingga relatif lebih mudah dalam pelaksanaan dan keberlanjutannya tinggal bagaimana cara menguatkan peran dari stakeholder terutama private sektor sebagai unsur pemanfaat PJLH.

Tabel 3.5				
Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah				
Tahun 2026				
Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
YUK SALIMAH	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Rp 10.100.000,00
BAJUMAS	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 40.696.349.954,50

3.3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IK RPJPD

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Setiap program dan kegiatan disusun dengan mengacu pada visi dan misi kepala daerah, serta menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah yang telah diidentifikasi.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini berperan sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan yang mendukung pencapaian indikator kinerja RPJPD. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), serta berbasis pada data dan analisis yang komprehensif. Fokus utama diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperhatikan kesetaraan dan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengembangan program dan kegiatan dalam bab ini juga mempertimbangkan kerangka regulasi nasional seperti RPJPN, serta rencana sektoral dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai tahapan implementatif. Dengan demikian, kesinambungan antara perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan tahunan dapat dijaga secara konsisten.

Tabel 3.6 Program Pendukung IK RPJPD

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada/ Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kualitas Lingkungan Hidup yang Meningkat	Indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKA,IKU dan IKTL		Ada			
	Definisi Operasional : Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				Sub kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Formulasi :				Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,495 x IKU) + (0,219 x IKTL)						
Penerapan Ekonomi Hijau	Indikatornya adalah Indeks Ekonomi Berkelanjutan	Skor lingkungan, skor ekonomi dan skor sosial		Ada			
	Definisi Operasional : pendekatan/pengganti indeks ekonomi hijau. Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Berkelanjutan terdiri dari 11 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (4 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (3 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 4 indikator: PDRB perkapita, Produktivitas pertanian (padi dan budidya ikan), Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 indikator: rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Indikator lingkungan terdiri dari 3 indikator: persentase luas tutupan hutan dari luas daratan, Konsentrasi BOD, Konsentrasi NO2.				Sub kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Formulasi :						

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada/ Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program																																																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																
	Skor Lingkungan x 0,5 + Skor Ekonomi x 0,3 + Skor Sosial x 0,2 $Skor\ Lingkungan = \frac{\sum_{i=1}^3 Skor\ Y_i}{3}$ $Skor\ Ekonomi = \frac{\sum_{i=1}^4 Skor\ Y_i}{4}$ $Skor\ Sosial = \frac{\sum_{i=1}^4 Skor\ Y_i}{4}$ $Skor\ Y_i = \frac{Y_i - Y_{min}}{Y_{max} - Y_{min}} \times 100$																																																																						
	<table><tr><th>NO</th><th>PILAR/INDIKATOR</th><th>NILAI MAX</th><th>NILAI MIN</th></tr><tr><td colspan="4">I PILAR LINGKUNGAN</td></tr><tr><td>1</td><td>Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%)</td><td>93,17</td><td>0,50</td></tr><tr><td>2</td><td>Konsentrasi BOD (mg/liter)</td><td>2,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Konsentrasi NO2 (µg/m3)</td><td>0,19</td><td>40,00</td></tr><tr><td colspan="4">II PILAR EKONOMI</td></tr><tr><td>1</td><td>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Juta Rp)</td><td>131,00</td><td>21,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Produktivitas pertanian (rata-rata) (ton/hektar/tahun)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>padi</td><td>72,00</td><td>48,00</td></tr><tr><td></td><td>budidaya ikan</td><td>19,00</td><td>3,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (IDR juta/orang)</td><td>200,00</td><td>20,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang)</td><td>200,00</td><td>20,00</td></tr><tr><td colspan="4">III PILAR SOSIAL</td></tr><tr><td>1</td><td>Rata-rata Lama Sekolah usia 25 th ke atas (tahun)</td><td>12,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Angka Harapan Hidup (tahun)</td><td>75,50</td><td>55,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>-</td><td>13,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</td><td>3,00</td><td>15,00</td></tr></table>				NO	PILAR/INDIKATOR	NILAI MAX	NILAI MIN	I PILAR LINGKUNGAN				1	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%)	93,17	0,50	2	Konsentrasi BOD (mg/liter)	2,00	6,00	3	Konsentrasi NO2 (µg/m3)	0,19	40,00	II PILAR EKONOMI				1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Juta Rp)	131,00	21,00	2	Produktivitas pertanian (rata-rata) (ton/hektar/tahun)				padi	72,00	48,00		budidaya ikan	19,00	3,00	3	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (IDR juta/orang)	200,00	20,00	4	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang)	200,00	20,00	III PILAR SOSIAL				1	Rata-rata Lama Sekolah usia 25 th ke atas (tahun)	12,00	2,00	2	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,50	55,00	3	Tingkat Kemiskinan (%)	-	13,00	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00
NO	PILAR/INDIKATOR	NILAI MAX	NILAI MIN																																																																				
I PILAR LINGKUNGAN																																																																							
1	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%)	93,17	0,50																																																																				
2	Konsentrasi BOD (mg/liter)	2,00	6,00																																																																				
3	Konsentrasi NO2 (µg/m3)	0,19	40,00																																																																				
II PILAR EKONOMI																																																																							
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Juta Rp)	131,00	21,00																																																																				
2	Produktivitas pertanian (rata-rata) (ton/hektar/tahun)																																																																						
	padi	72,00	48,00																																																																				
	budidaya ikan	19,00	3,00																																																																				
3	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (IDR juta/orang)	200,00	20,00																																																																				
4	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang)	200,00	20,00																																																																				
III PILAR SOSIAL																																																																							
1	Rata-rata Lama Sekolah usia 25 th ke atas (tahun)	12,00	2,00																																																																				
2	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,50	55,00																																																																				
3	Tingkat Kemiskinan (%)	-	13,00																																																																				
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00	15,00																																																																				
Lingkungan Berkualitas	Indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKA,IKU dan IKTL		Ada	Sub kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																																																																
	Definisi Operasional : Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi		Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																																																																	
	Formulasi :																																																																						
	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,495 x IKU) + (0,219 x IKTL)																																																																						
	Indikatornya adalah Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Timbulan Sampah dan total populasi orang		Ada																																																																			

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada/ Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Definisi Operasional : sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat.				<i>Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
	Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan Upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.						
	Formulasi :						

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada/ Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) = - + Keterangan: $SO = ST - MFPA - RDP$ (ton/hari) SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) = + - Keterangan: $SO = MFPD + DPA - RPD$ (ton/hari) SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah = (+) Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat diestimasi menggunakan perhitungan berikut. = 70% h + 30% $- h$ = / 70% Keterangan: $TS = TPRT \times h + TPNRT \times (-h)$ TS : Timbulan sampah (ton/hari) TS RT : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah % = (/) 100% Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)						

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada/ Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indikatornya adalah Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dan Jumlah rumah tangga seluruhnya		Ada			
	Definisi Operasional :						
	Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.				Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
	Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.						
	Formulasi :						
	Persentase Rumah tangga						
	Indikatornya adalah Proporsi rumah tangga dengan layanan	Hasil		Ada	Sub Kegiatan Penanganan	Kegiatan Pengelolaan	Program Pengelolaan
	Definisi Operasional : Jumlah sampah terproses di TPA						
	Formulasi :						
	Hasil pendataan/pencatatan sampah yang terkirim ke TPA						

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada/ Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tangguh terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indikatornya adalah Potensi penurunan Emisi GRK (gas rumah kaca)	Potensi Penurunan Emisi GRK pada aplikasi Aksara		Ada	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Definisi Operasional : Potensi penurunan dan intensitas emisi GRK, data diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pembangunan rendah karbon yang diimplementasikan, yaitu pada Perangkat Daerah yang membidangi sektor energi, transportasi, kehutanan dan lahan gambut, pertanian, persampahan, air limbah serta kelautan dan pesisir						
	Formulasi :						
	Total Potensi Penurunan Emisi GRK pada tahun N ditambah dengan Total Potensi Penurunan Emisi GRK pada tahun N-1 (Kumulatif) pada aplikasi Aksara						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2026 sebagai acuan bagi OPD yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2026 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah :

1. Dinas / Instansi / Organisasi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
2. Masyarakat / Pemerhati / Komunitas pegiat lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
3. Masyarakat lingkungan sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Industri / usaha / UMKM yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan atau perusak di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	9.936.830.145			100%	18.827.556.506
2.11.01.2.01	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dok rencana,anggaran, dan evaluasi	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subk egiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%	110.724.400			100%	286.500.000
2.11.01.2.01.0001	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasuruan	3 dokumen	51.090.000 : 51.090.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 51.090.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		3 dokumen	145.200.000,00
2.11.01.2.01.0002	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	7.744.400 Belanja Operasi : 7.744.400 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 7.744.400 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		2 dokumen	16.800.000,00
2.11.01.2.01.0003	3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	9.525.000 Belanja Operasi : 9.525.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 9.525.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		2 dokumen	20.250.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.01.0004	4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	7.850.000 Belanja Operasi : 7.850.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 7.850.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 dokumen	24.900.000,00
2.11.01.2.01.0005	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	9.525.000 Belanja Operasi : 9.525.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 9.525.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 dokumen	20.250.000,00
2.11.01.2.01.0006	6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	4 laporan	10.440.000 Belanja Operasi : 10.440.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 10.440.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		4 laporan	20.350.000,00
2.11.01.2.01.0007	7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	3 laporan	14.550.000 Belanja Operasi : 14.550.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 14.550.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		3 laporan	38.750.000,00
2.11.01.2.02	2 Kegiatan Administrasi	Meningkatnya	Persentase laporan		100%	8.648.808.045			100%	14.500.085.624
2.11.01.2.02.0001	8 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	80 orang- bulan	8.377.408.045 Belanja Operasi : 8.377.408.045 - Belanja Pegawai 8.377.408.045 - Belanja Barang & Jasa -	DAU		80 orang- bulan	14.157.585.624

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
						- Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -				
2.11.01.2.02.0002	9 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	36 dokumen	250.100.000 Belanja Operasi : 250.100.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa 250.100.000 - Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu :	DAU		36 dokumen	280.000.000
2.11.01.2.02.0004	10 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pasuruan	6 dokumen	5.100.000 Belanja Operasi : 5.100.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa 5.100.000 - Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer :	DAU		6 dokumen	15.500.000
2.11.01.2.02.0007	11 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Kab. Pasuruan	19 laporan	10.100.000 Belanja Operasi : 10.100.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa 10.100.000 - Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer :	DAU		19 laporan	35.000.000
2.11.01.2.02.0008	12 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisisn Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pasuruan	2 dokumen	6.100.000 Belanja Operasi : 6.100.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa 6.100.000 - Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer :	DAU		2 dokumen	12.000.000
2.11.01.2.03	3 Kegiatan Administrasi	Meningkatnya	Persentase		100%	14.000.000			100%	34.479.000
2.11.01.2.03.0002	13 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasuruan	4 dokumen	14.000.000 Belanja Operasi : 14.000.000 - Belanja Pegawai : -	DAU		6 dokumen	34.479.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
						- Belanja Barang & Jasa 14.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -				
2.11.01.2.05	4 Kegiatan Administrasi	Meningkatnya	Persentase dokumen		100%	20.100.000			100%	109.000.000
2.11.01.2.05.0009	14 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasuruan	32 orang	20.100.000 Belanja Operasi : 20.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 20.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		32 orang	109.000.000
2.11.01.2.06	5 Kegiatan Administrasi	Meningkatnya	Persentase pemenuhan		100%	370.600.000			100%	1.262.954.835
2.11.01.2.06.0001	15 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	48paket	50.100.000 Belanja Operasi : 50.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 50.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		48paket	295.330.874
2.11.01.2.06.0002	16 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	6 paket	40.100.000 Belanja Operasi : 40.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 40.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		6 paket	476.950.818
2.11.01.2.06.0003	17 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasuruan	8 paket	30.100.000 Belanja Operasi : 30.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 30.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		8 paket	42.174.218
2.11.01.2.06.0005	18 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 paket	25.100.000 Belanja Operasi : 25.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 25.100.000	DAU		12 paket	71.647.249

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
						- Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -				
2.11.01.2.06.0008	19 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	12 laporan	25.100.000 Belanja Operasi : 25.100.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 25.100.000 - Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -	DAU		12 laporan	52.733.700
2.11.01.2.06.0009	20 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	12 laporan	200.100.000 Belanja Operasi : 200.100.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 200.100.000 - Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -	DAU		12 laporan	324.117.976
2.11.01.2.07	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan BMD yang terealisasi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		100%	46.309.000			100%	1.632.295.831
2.11.01.2.07.0001	21 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	1 unit	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 100.000 - Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -	DAU		1 unit	764.021.000
2.11.01.2.07.0002	22 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	1 unit	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 100.000 - Belanja Hibah : Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -	DAU		1 unit	513.056.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.07.0006	23 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasuruan	5 unit	23.349.000 Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : 23.349.000 Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		5 unit	47.769.000
2.11.01.2.07.0010	24 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasuruan	18 unit	22.760.000 Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : 22.760.000 Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		5 unit	307.449.831
2.11.01.2.08	7 Kegiatan Penyediaan	Meningkatnya jasa	Persentase jasa penunjang		100%	305.785.200			100%	365.968.084
2.11.01.2.08.0002	25 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	48 laporan	285.685.200 Belanja Operasi : 285.685.200 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 285.685.200 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		48 laporan	295.330.874
2.11.01.2.08.0003	26 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	5 laporan	20.100.000 Belanja Operasi : 20.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 20.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		5 laporan	70.637.210
2.11.01.2.09	8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD kondisi baik	Persentase BMD kondisi baik		100%	420.503.500			100%	636.273.132
2.11.01.2.09.0002	27 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dihayarkan Pajak dan	Kab. Pasuruan	6 unit	268.342.700 Belanja Operasi : 268.342.700 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 268.342.700	DAU		6 unit	383.483.688

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Membiayai Pengadaan Perizinannya			- Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
2.11.01.2.09.0005	28 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	12 unit	2.100.000 Belanja Operasi : 2.100.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 2.100.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		12 unit	2.250.000
2.11.01.2.09.0006	29 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	8 unit	20.060.800 Belanja Operasi : 20.060.800 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 20.060.800 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		8 unit	31.408.532
2.11.01.2.09.0009	30 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	2 unit	100.000.000 Belanja Operasi : 100.000.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 100.000.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 unit	187.538.205
2.11.01.2.09.0010	31 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	2 unit	30.000.000 Belanja Operasi : 30.000.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang & Jasa : 30.000.000 - Belanja Hibah : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 unit	31.592.707
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	UP Bidang Lingkungan Hidup									
2.11.02	2 Program Perencanaan	Meningkatnya RPPLH	Persentase pemenuhan	Kab.	60,00%	178.700.000			60,00%	1.067.145.600
	9 Kegiatan Rencana		Jumlah dokumen	Kab.	6 dokumen	168.700.000			6 dokumen	721.460.600
2.11.02.2.01.0002	32 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	5 dokumen	158.700.000 Belanja Operasi : 158.700.000 - Belanja Pegawai : -	DAU		5 dokumen	675.625.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
	Kabupaten/Kota	Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH Kabupaten/Kota			- Belanja Barang & Jasa 158.700.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -				
2.11.02.2.01.0006	33 Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kaupaten/Kota	RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kab. Pasuruan	1 dokumen	10.000.000 Belanja Operasi : 10.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 10.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	45.835.600
2.11.02.2.02	## Kegiatan	Meningkatnya	Jumlah Dokumen KLHS		1 dokumen	10.000.000			1 dokumen	345.685.000
2.11.02.2.02.0005	34 Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pasuruan	1 dokumen	10.000.000 Belanja Operasi : 10.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 10.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	345.685.000
2.11.03	3 Program Pengendalian ## Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Upaya Meningkatnya upaya kegiatan pencegahan terhadap media air dan udara	Persentase Persentase meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara	Kab. Kab. Pasuruan	25,44% 3,61%	1.381.892.300 991.299.800			28,22% 4,18%	3.432.192.000 2.137.056.500
2.11.03.2.01.0002	35 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Pasuruan	2 dokumen	50.100.000 Belanja Operasi : 50.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 50.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		3 dokumen	150.000.000
2.11.03.2.01.0004	36 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah.	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	Kab. Pasuruan	28 kegiatan	50.100.000 Belanja Operasi : 50.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 50.100.000 - Belanja Hibah -	DAU		33 kegiatan	125.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
		Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Laut yang dilaksanakan			Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer :	- - -			
2.11.03.2.01.0006	37 Subkegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Kab. Pasuruan	25 laporan	15.100.000 Belanja Operasi : 15.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 15.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		30 laporan	35.000.000
2.11.03.2.01.0007	38 Subkegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab. Pasuruan	94 lokasi	208.000.000 Belanja Operasi : 208.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 208.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah	TAGGING ASTA CITA	94 lokasi	256.800.000
2.11.03.2.01.0009	39 Subkegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan kabupaten/kota	Beroperasi dan berfungsi alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Pasuruan	2 unit	150.000.000 Belanja Operasi : 150.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 150.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah		2 unit	210.000.000
2.11.03.2.01.0012	40 Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan		- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah	TAGGING ASTA CITA	1 paket	105.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.03.2.01.0015	41 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	Kab. Pasuruan	1229 dokumen	517.999.800 Belanja Operasi : 465.747.700 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 465.747.700 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 52.252.100 Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah		1254 dokumen	1.255.256.500
2.11.03.2.02	## Kegiatan	Meningkatnya	Persentase pemberian	Kab.	1,37%	70.192.500			1,92%	491.112.000
2.11.03.2.02.0001	42 Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Pasuruan	50 laporan	50.100.000 Belanja Operasi : 50.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 50.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		55 laporan	407.552.000
2.11.03.2.02.0003	43 Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab. Pasuruan	4 titik	20.092.500 Belanja Operasi : 20.092.500 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 20.092.500 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah		4 titik	83.560.000
2.11.03.2.03	## Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan		13,70%	320.400.000			15,90%	804.023.500
2.11.03.2.03.0006	44 Sub Kegiatan Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Jumlah kumulatif luasan lahan terdampak kegiatan remediasi yang telah dilakukan	Kab. Pasuruan	0,5 ha	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : -	Pajak Air Tanah		1 ha	118.900.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja Transfer : -				
2.11.03.2.03.0008	45 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dansinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	1 kegiatan	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		1 kegiatan	46.300.000
2.11.03.2.03.0009	46 Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	50 ha	320.000.000 Belanja Operasi : 320.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 320.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah	atensi Bupati pengendalian limbah KOHE desa Balonganyar Lekok	60 ha	399.623.500
2.11.03.2.03.0012	47 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	3 kegiatan	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		3 kegiatan	110.000.000
2.11.03.2.03.0013	48 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinkegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	50 kegiatan	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		58 kegiatan	129.200.000
2.11.04	4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan	Kab. Pasuruan	21,05%	40.696.449.954,50			26,32%	25.585.220.000
2.11.04.2.01	## Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Meningkatnya RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun	Jumlah RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun	Kab. Pasuruan	1100 ha	40.696.449.954,50			1150 ha	25.585.220.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.04.2.01.0001	49 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kab. Pasuruan	2 dokumen	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		2 dokumen	360.000.000
2.11.04.2.01.0004	50 Sub Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	1060 ha	40.696.349.954,50 Belanja Operasi : 2.195.609.901 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 2.195.609.901 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 38.500.740.054,00 Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah	(rutin taman=35 4.750.000), alun2 bangil 30M, alun2 wonorejo 10M,pokir RTH	1060 ha	25.225.220.000
2.11.05 2.11.05.2.01	5 Program Pengendalian ## Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya Meningkatnya pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	Persentase Pengelolaan Persentase pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3		47,00% 100%	55.400.000 30.200.000			60% 100%	645.177.000 262.150.700
2.11.05.2.01.0005	51 Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subniti on)	Terfasilitasinya pemenuhan rincian teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subniti on)	Jumlah Fasilitasi pemenuhan rincian teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subniti on)	Kab. Pasuruan	30 dokumen	20.100.000 Belanja Operasi : 20.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 20.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		30 dokumen	169.193.900
2.11.05.2.01.0006	52 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Jumlah Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Kab. Pasuruan	10 kegiatan/usaha	10.100.000 Belanja Operasi : 10.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 10.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : -	DAU		10 kegiatan/ usaha	92.956.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja Transfer : -				
2.11.05.2.02	## Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten		100%	25.200.000			100%	383.026.300
2.11.05.2.02.0006	53 Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	Jumlah Fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3	Kab. Pasuruan	1 dokumen	5.100.000 Belanja Operasi : 5.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 5.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	13.930.500
2.11.05.2.02.0002	54 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Pasuruan	1 dokumen	20.100.000 Belanja Operasi : 20.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 20.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	369.095.800
2.11.06	6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah		60%	228.200.000			67%	560.000.000
2.11.06.2.01	## Kegiatan Pembinaan	Meningkatnya	Persentase Pengawasan		17,52%	228.200.000			18,66%	560.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.06.2.01.0007	55 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Pasuruan	17 orang	20.100.000 Belanja Operasi : 20.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 20.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		17 orang	110.000.000
2.11.06.2.01.0009	56 Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Pasuruan	51 badan usaha	208.100.000 Belanja Operasi : 208.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 208.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		51 badan usaha	450.000.000
2.11.07	7 Program Pengakuan	Meningkatnya MHA	Persentase MHA yang		25%	25.200.000			25%	223.889.000
2.11.07.2.01	## Kegiatan Pengakuan	Meningkatnya MHA	Jumlah MHA yang		2 lembaga	10.100.000			2 lembaga	94.232.000
2.11.07.2.01.0001	57 Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	2 dokumen	10.100.000 Belanja Operasi : 10.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 10.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		2 dokumen	94.232.000
2.11.07.2.02	## Kegiatan Peningkatan	Meningkatnya MHA	Jumlah MHA yang		2 lembaga	15.100.000			2 lembaga	129.657.000
2.11.07.2.02.0001	58 Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan,Kemitra an, Pendampingan dan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan,	Kab. Pasuruan	2 dokumen	15.100.000 Belanja Operasi : 15.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 15.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : -	DAU		2 dokumen	129.657.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
	MHA Terkait dengan PPLH	Penguatan	Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan			Belanja Transfer : -				
2.11.08	8 Program Peningkatan	Meningkatnya	Persentase lembaga		4,25%	97.460.000			4,34%	484.655.000
2.11.08.2.01	## Kegiatan	Meningkatnya	Jumlah Lembaga		88 lembaga	97.460.000			88 lembaga	484.655.000
2.11.08.2.01.0002	59 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Pasuruan	4 dokumen	97.460.000 Belanja Operasi : 97.460.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 97.460.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU SG		4 dokumen	484.655.000
2.11.09	9 Program Penghargaan	Meningkatnya	Persentase		5,47%	20.100.000			5,97%	174.632.300
2.11.09.2.01	## Kegiatan Pemberian	Meningkatnya	Persentase		5,28%	20.100.000			5,28%	174.632.300
2.11.09.2.01.0001	60 Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Pasuruan	4 entitas	20.100.000 Belanja Operasi : 20.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 20.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		4 entitas	174.632.300
2.11.10	# Program Penanganan	Meningkatnya	Persentase ketaatan		100%	56.700.000			100%	205.954.000
2.11.10.2.01	## Kegiatan Penyelesaian	Meningkatnya	Persentase jumlah		100%	56.700.000			100%	205.954.000
2.11.10.2.01.0009	61 Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Pasuruan	15 pengaduan	46.600.000 Belanja Operasi : 46.600.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 46.600.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		15 pengaduan	124.209.000
2.11.10.2.01.0005	62 Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	15 perkara	10.100.000 Belanja Operasi : 10.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 10.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : -	DAU		15 perkara	81.745.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
		kewenangan kabupaten/kota				Belanja Transfer : -				
2.11.11	# Program Pengelolaan	Meningkatnya Meningkatnya	Persentase capaian Persentase capaian		83,00%	20.073.032.939			85,00%	16.962.997.544
					50,00%				60,00%	
2.11.11.2.01	## Kegiatan Pengelolaan	Meningkatnya Meningkatnya	Persentase capaian Persentase capaian		11,00%	20.073.032.939			10,40%	16.962.997.544
					11,30%				14,10%	
2.11.11.2.01.0004	63 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Pasuruan	33 kelompok	<u>10.100.000</u> Belanja Operasi : 10.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 10.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		33 kelompok	61.500.000
2.11.11.2.01.0005	64 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada RPJPD	Kab. Pasuruan	1 dokumen	<u>30.100.000</u> Belanja Operasi : 30.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 30.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	55.384.500
2.11.11.2.01.0007	65 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemrosesan Akhir	Kab. Pasuruan	2 unit	<u>3.000.100.000</u> Belanja Operasi : 150.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 150.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 2.850.000.000 Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah	atensi Bupati untuk pelayanan sampah utamanya pembenahan TPA wonokerto	2 unit	3.453.687.600
2.11.11.2.01.0008	66 Sub Kegiatan	Tersusunnya	Jumlah dokumen	Kab.	2 dokumen	<u>40.100.000</u>	DAU	2.000.000	2 dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Pasuruan		Belanja Operasi : 40.100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 40.100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -				
2.11.11.2.01.0027	67 Sub Kegiatan Koordinasi, dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Kab. Pasuruan	1 dokumen	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	20.000.000
2.11.11.2.01.0011	68 Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	1 laporan	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	DAU		1 laporan	10.000.000
2.11.11.2.01.0012	69 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kab. Pasuruan	47847 ton	200.000.000 Belanja Operasi : 200.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 200.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah		45555 ton	2.190.380.644
2.11.11.2.01.0015	70 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan	Kab. Pasuruan	30 unit	163.000.000 Belanja Operasi : 163.000.000	Pajak Air Tanah		30 unit	774.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.11.2.01.0016	sarana dan prasarana penanganan sampah	terpelihara dengan baik	baik			- Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 163.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : 547.332.939				
	71 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Kab. Pasuruan	0,25%	Belanja Operasi : 547.332.939 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 547.332.939 - Belanja Hibah - Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah	TAGGING ASTA CITA, Pokir 510.000.000 6 unit (prigen,ko lursari bangil,ge mpol,beji, kolursari bangil)	0,30%	2.000.000.000
2.11.11.2.01.0017	72 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Pasuruan	111466 ton	15.332.000.000 Belanja Operasi : 1.532.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.532.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 13.800.000.000 Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah	TAGGING ASTA CITA (132.000.000), pengadaa n insenerato r di 4 lokasi (tosari, puspo, lekok, bangil) @ 3.800.000.000 (15.200.000.000)	61762 Ton	5.167.000.000
2.11.11.2.01.0018	73 Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Pasuruan	1 laporan	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : Belanja Transfer : -	DAU		1 laporan	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.11.2.01.0030	74 Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kab. Pasuruan	43497 Ton	50.000.000 Belanja Operasi : 50.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 50.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah		43803 Ton	200.000.000
2.11.11.2.01.0020	75 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Pasuruan	47847 Ton	700.000.000 Belanja Operasi : 700.000.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 700.000.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -	Pajak Air Tanah	TAGGING ASTA CITA	45555 Ton	2.971.044.800
						Belanja Operasi : 72.749.965.338,50 - Belanja Pegawai 8.377.408.045 - Belanja Barang & Jasa 9.123.456.140 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 55.249.101.154,00 Belanja Tidak Terdu : - Belanja Transfer : -				
						Total Belanja PD : 72.749.965.338,50	-	-	-	68.169.418.950

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

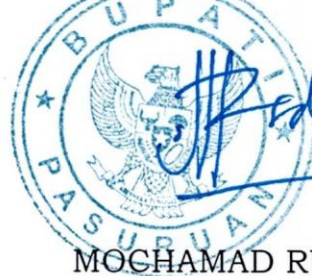
1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO